

E-NEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATENSI

Edisi Januari | Tahun 2021 No.1

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Gejolak Harga Pangan

Peringatan Dini Tantangan Pemerintah Sepanjang 2021

Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M

Pak Presiden Kita Tidak Sedang Baik-Baik Saja

KUTIPAN

Diantara yang meninggal tersebut, kepiluan makin menukik saat para tenaga kesehatan berguguran. Data terbaru Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut Indonesia saat ini menduduki peringkat pertama kematian tenaga medis di Asia, dan lima besar di seluruh di dunia

Saat membagikan bantuan modal kerja (BMK) kepada sejumlah pedagang di Istana Bogor, Jumat (8/1), Presiden Jokowi masih bersyukur karena kondisi di Indonesia tidak seburuk beberapa negara lain yang harus menerapkan lockdown di tengah pandemi.

Jokowi bersyukur warga Indonesia masih bisa beraktivitas meski terbatas dan harus menerapkan protokol kesehatan ketat. Selain itu, pandemi juga berpengaruh kepada kondisi ekonomi masyarakat.

Sambutan yang melampangkan dada, namun jauh dari indikator realitas. Pak Presiden kita tidak sedang baik-baik saja. Sudah 10 bulan berlalu pandemi, namun kurva enggan turun. Kasus harian covid 19 di Indonesia tak kunjung menurun sejak

Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus perdana pada 2 Maret 2020. Kasus harian berada di angka 5.000 sampai 6000-an. Bahkan dalam hari-hari terakhir mencapai puncak, 10 ribu per hari. Jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 808.340 orang. Dengan angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia tercatat sebesar 23.753 orang.

Diantara yang meninggal tersebut, kepiluan makin menukik saat para tenaga kesehatan berguguran. Data terbaru Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut Indonesia saat ini menduduki peringkat pertama kematian tenaga medis di Asia, dan lima besar di seluruh di dunia. Data Tim Mitigasi PB IDI mengungkapkan 504 tenaga medis di Indonesia meninggal dunia akibat terpa-

par covid 19, dengan rincian 237 dokter, 15 dokter gigi, 171 perawat, 64 bidan, 7 apoteker, dan 10 tenaga lab medik.

Dalam kondisi pandemi, korupsi bencana masih terjadi. Dua Menteri tidak tanggung. Satu Menteri malah terkait langsung Covid 19. Bener-bener tragis.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita duit Rp 14,5 miliar dari penangkapan pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial, puncaknya berujung di Menteri Sosial yang diduga telah menerima suap senilai Rp 17 miliar.

Duit ini dipungut dari pemotongan dana bantuan sosial sebesar Rp 10 ribu dari paket bahan pokok seharga Rp 300 ribu. Selama delapan bulan sudah 23,708 juta paket atau total senilai Rp 6,464 triliun yang disalurkan.

Pandemi memang merusak banyak hal. Bukan hanya kita, tapi juga negara lain. Tapi krisis dalam lintasan sejarah menjadi salah satu cara untuk menunjukkan watak kepemimpinan dan soliditas sebuah bangsa. Kita melihat banyak bangsa berhasil melewati fase awal pandemi karena menjadikannya sebagai momentum "turning point for better", namun disisi lain dalam saat bersamaan kita justru



Image : Media Indonesia

menjadi "turning point more worse". Sebagaimana definisi dari Webster Crisis is the turning point for better or worse in an acute disease or fever.

Hantaman tidak selesai. Awal tahun sejumlah kebutuhan dan komoditas merangkak naik, kedelai jadi bukti betapa tata niaga impor masih sangat dominan dan produksi nasional tidak kunjung tercapai. Cabai, daging sapi, dan lainnya antri menyusul. Jerat impor dan "invisible hand" terjadi dibanyak sektor, tidak hanya pangan. Menjamur dan mengakar, saling berkait satu sama lain mengunci kuat.

Kala pandemi seperti ini kebijakan proteksionisme dilakukan oleh banyak negara, tidak mudah mendatangkan barang. Jika saja sejak awal konsentrasi pada penguatan produksi lokal tentu tidak akan bergantung dan terjebak pada pasokan pihak lain. Kita akan lebih perhatian pada persoalan kesehatan, tanpa harus

membenturkan dengan ekonomi. Kesehatan manusia Indonesia.

Di sektor non pangan iuran BPJS kelas III naik, argumentasi covid dan pelemahan ekonomi tidak berhasil membumbangkan brasat pengambil kebijakan. Pun Bea Materai naik dengan tarif tunggal di awal tahun, kemungkinan sudah anggang-ancang di garis start kenaikan tarif tol dan lainnya.

Kala semua indikator menunjukkan alarm, anehnya ada yang masih merasa baik-baik saja. Sibuk membandingkan dengan negara lainnya. Dengan mengatakan bahwa kenaikan hanya sedikit, demokrasi dan cara kita benegara aman. Entah darimana cara berpikir seperti ini dimulai, kala orang yang meninggal sudah semakin dekat dan menjadi informasi yang tak henti di aplikasi berbagi pesan. Tidak kah kita sadar bahwa kita tidak sedang baik-baik saja.



Gejolak Harga Komoditas Pangan

Politisi PKS: Peringatan Dini Tantangan Pemerintah Sepanjang 2021

KUTIPAN

Jakarta (04/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin memperhatikan gejolak harga pangan

mulai dari Kedelai, Cabe, telur ayam, dan daging sapi merupakan 'early warning'/ peringatan dini kepada pemerintah untuk dijadikan sebagai tantangan utama dalam menghadapi persoalan sepanjang tahun 2021.

Politisi PKS asal Sulawesi Selatan II ini seringkali mengingatkan kepada Pemerintah agar selalu waspada pada setiap pergantian tahun, untuk mengevaluasi kinerja dalam pelayanan kepada rakyat sehingga menjadi program prioritas baik dari sisi penganggaran, sisi fokus SDM maupun dalam penentuan target tujuannya.

"Hingga saat ini persoalan energi, pangan, pendidikan dan kesehatan menjadi tantangan berat bagi negara ini untuk membuat langkah-langkah menjadi negeri yang berdaulat. Daulat akan pangan dan Energi semestinya mampu diciptakan

tidak terlalu lama akibat dukungan sumber daya alam yang memadai. Untuk penguatan sektor kesehatan dan pendidikan juga akan menjadi sangat vital berkaitan dengan daya saing negara kita di dunia internasional", tutur Akmal.

Akmal sangat menyayangkan, bahwa persoalan kenaikan kedelai saat ini sebenarnya kejadian berulang tiap tahun.

"Kenaikan harga kedelai hingga menjadi Rp 9.200 per kilogram telah memicu sejumlah protes hingga mogok produksi para perajin tahu tempe di Jabodetabek, sebagian Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Banten, hingga Aceh. Protes mereka sangat wajar untuk mendapat perhatian pemerintah agar ada solusi berkaitan dengan persoalan harga ini," terangnya.

Begitu juga dengan harga Cabai dan daging sapi. Sejak medio desember, Anggota Komisi IV DPR ini memantau ada Kenaikan cabai terjadi secara berkelanjutan. Harga rata-rata cabai merah di angka Rp 50.300 per kilogram hingga Rp 57.300 per kilogram. Sedangkandaging sapi sudah mencapai Rp 118.850 per kilogram dari harga normal Rp 110.000 per kilogram.

Legislator PKS yang selalu konsern terhadap persoalan pangan, pertanian, perikanan dan kehutanan ini mengingatkan pemerintah, agar ada formula tersistem dalam menangani persoalan harga pangan ini.

Akmal sering kali mengungkapkan berkaitan dengan stabilitas komoditas pangan dan pertanian ini dalam suasana pandemi sangat kokoh akibat kebutuhan yang stabil. Bahkan pihak pemerintah melalui kementan beserta seluruh jajarannya pun sudah sering menyampaikan dalam berbagai forum kenegaraan, bahwa Sektor pangan perlu dukungan kebijakan yang lebih dari saat ini.



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.
Anggota Komisi IV DPR RI

Saya berharap pemerintah mulai membuat prioritas tinggi dalam menghadapi persoalan pangan dan pertanian ini. Bukti terhadap dukungan pemerintah di sektor pangan dan pertanian ini adalah, adanya alokasi APBN yang proporsional terhadap sektor pangan dan pertanian

"Saya berharap pemerintah mulai membuat prioritas tinggi dalam menghadapi persoalan pangan dan pertanian ini. Bukti terhadap dukungan pemerintah di sektor pangan dan pertanian ini adalah, adanya alokasi APBN yang proporsional terhadap

sektor pangan dan pertanian. Awal kemajuan pertanian kita adalah, semua dukungan SDM dan Anggaran mulai dari riset, produksi, sarana pra sarana, hingga industri pasca panen perlu dikembangkan", tutup Andi Akmal Pasluddin.

Atasi Gejolak Harga Kedelai

Johan Dorong Pemerintah Berdayakan Petani Lokal

KUTIPAN

Sumbawa (03/01) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengaku prihatin atas meroketnya harga kedelai,

yang berdampak serius terhadap kelangsungan usaha dari ribuan UKM (Usaha Kecil Menengah) serta terjadinya mogok produksi produsen tahu dan tempe di berbagai daerah.

Johan melihat terjadinya lonjak-an harga kedelai disebabkan karena ketergantungan dengan impor dan lemahnya tata Kelola perniagaan kedelai lokal sehingga harganya belum kompetitif.

"Saat ini Pemerintah harus sadar bahwa ketergantungan impor pasti berdampak serius terhadap stabilitas harga dan ketahanan pangan kita", papar Johan.

Untuk mengatasi gejolak harga kedelai saat ini, Politisi PKS ini mendorong Pemerintah agar segera mengambil

Langkah cepat dengan cara memberdayakan para petani kedelai lokal serta mengelola harga jualnya agar tidak kalah bersaing dengan produk impor.

"Saya berharap Pemerintah segera mengambil kebijakan stabilisasi harga kedelai untuk menyelamatkan keberlangsungan usaha dari produksi tahu dan tempe, apalagi pada masa pandemi ini harus ada prioritas untuk membantu ribuan usaha kecil menengah berbasis pemberdayaan produk lokal agar ekonomi nasional segera pulih," ujar Johan.

Anggota Legislatif dari dapil NTB 1 ini mengkritik Kinerja Pemerintah yang gagal mencapai target peningkatan volume produksi kedelai lokal

selama tahun 2020 lalu, realisasi luas panen tanaman kedelai kita selama tahun 2020 hanya mencapai 40,04% dari target yang telah ditetapkan pemerintah", urai Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa NTB ini berharap ke depan pemerintah memberikan perhatian serius kepada petani kedelai lokal dan fokus mengembangkan Kawasan komoditas kedelai terutama Kawasan utama kedelai yang terdiri dari empat provinsi, yakni Jatim seluas 78.937 Ha, Jateng seluas 39.248 Ha, Jabar seluas 37.393 Ha serta Provinsi NTB seluas 30.864 Ha.

"Saya minta Pemerintah segera melakukan Langkah pengembangan Kawasan utama kedelai seluas 127.419 Ha untuk peningkatan produktivitas dan melakukan ekstensifikasi agar kita tidak lagi tergantung dengan impor kedelai," tandas Johan.

Selanjutnya Johan mendesak Pemerintah untuk bekerja keras pada tahun 2021 ini untuk meningkatkan produksi kedelai lokal karena tahun 2020 angka produksi kedelai hanya mencapai 0,323 juta ton jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

"Hal ini penting karena produk Pertanian kita harus menjadi penyelamat dari keterpurukan ekonomi pada masa pandemi ini," tutup Johan.



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.
Anggota Komisi IV DPR RI

"Saya minta Pemerintah segera melakukan Langkah pengembangan Kawasan utama kedelai seluas 127.419 Ha untuk peningkatan produktivitas dan melakukan ekstensifikasi agar kita tidak lagi tergantung dengan impor kedelai"

Kenaikan Harga Harus Dijadikan **Pemicu** Mobilisasi Budidaya Kedelai Lokal

KUTIPAN

Sukabumi (05/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet merespon kondisi naiknya harga kedelai di pasaran yang berdampak bagi sejumlah petani.

Menurut Slamet, kondisi ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, jadi demikian nasib para petani di Indonesia. Sudah tata kelola distribusinya jelek (langkah saat petani butuh), sekarang harga dinaikkan.

Hal ini, lanjutnya, disebabkan karena kedelai impor Amerika yang biasa dijadikan bahan baku pembuatan tempe dan tahu mengalami lonjakan harga yang sangat signifikan.

"Dari harga asal Rp 7.200/kg menjadi Rp 9.200/kg. Sementara harga kedelai lokal yang harganya Rp 9.500/kg memang jarang digunakan oleh industri tempe / tahu," ujar Anggota Komisi IV DPR RI ini, Selasa (05/01).

Menurut Slamet, kenaikan harga ini sebenarnya sudah menjadi hal yang sering diingatkan kepada Pemerintah ketika pemerintah lebih banyak

mengimpor produk pangan ketimbang memperdayakan petani produksi petani dalam negeri.

"Ini baru kedelai, belum beras dan lainnya. Hanya menunggu waktu jika Pemerintah belum juga menjadikan pertanian pangan dalam negeri berdaulat di negeri sendiri," demikian warning yang disampaikan Anggota DPR RI dari FPKS, Slamet.

Menurut Slamet, setelah situasi ini, pihaknya berharap Kementan segera membenahi industri pertanian kedelai lokal. Bagaimana agar kualitas dan harganya bisa mendekati harga dan kualitas kedelai impor.

"Sehingga kita tidak dipermainkan oleh asing. Industri tempe / tahu bisa menggunakan kedelai lokal sebagai bahan baku mereka," paparnya.

Kata Slamet, sudah terbukti kedelai lokal lebih sehat karena bukan barang yang diproduksi dari hasil rekayasa genetik atau GMO (Genetically Modified Organism) seperti kedelai impor.

Kedelai impor menjadi produk dengan kualitas dan harga yang rendah karena sudah di rekayasa secara genetik sehingga produksinya bisa cepat.

"GMO menjadi pangan yang kontroversial sejak awal penemuannya. Tapi sekarang hal itu sudah menjadi hal yang dilupakan orang karena krisis ekonomi membuat orang lebih mempertimbangkan harga dari pada keamanan pangan," tandasnya.

Oleh karenanya, sambung Slamet, itu ketika sekarang produk impor harganya tidak lagi murah maka Kementan seharusnya segera mengambil kesempatan untuk mendukung petani kedelai lokal agar bisa memproduksi lebih banyak lagi dari sebelumnya.



dr. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI

Kenaikan harga ini sebenarnya sudah menjadi hal yang sering diingatkan kepada Pemerintah ketika pemerintah lebih banyak mengimpor produk pangan ketimbang memperdayakan petani produksi petani dalam negeri. Ini baru kedelai, belum beras dan lainnya. Hanya menunggu waktu jika Pemerintah belum juga menjadikan pertanian pangan dalam negeri berdaulat di negeri sendiri

Harga Kedelai Melonjak hingga Tahu Tempe Menghilang

DPR: Catatan Merah Pemerintah di Awal 2021

KUTIPAN

Jakarta (05/01) --- Menghilangnya tempe tahu dari pasaran karena mogoknya para produsen untuk melakukan produksi beberapa hari belakangan ini, dipastikan karena harga kedelai yang melonjak naik.

Kondisi ini menguak fakta mencengangkan bahwa hingga saai ini, Indonesia masih sangat mengandalkan kedelai import sebagai bahan baku utama pembuatan tempe tahu.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan tanggapan serius di Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Anis mengatakan, kenaikan harga kedelai menjadi catatan merah di awal tahun 2021 ini. Di tengah dampak pandemi Covid-19 yang belum juga selesai, resesi ekonomi dan sekarang ditambah lagi dengan naiknya harga kedelai, tentu saja berimbas kepada produsen tahu dan tempe.

"Sementara tahu dan tempe adalah makanan pokok

setelah nasi bagi masyarakat," katanya.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini kemudian mengemukakan catatan pentingnya. Pertama, masalah data yang selalu menjadi faktor utama dan menjadi masalah. Indonesia adalah negara agraris, tetapi sektor pertaniannya tidak berkembang, bahkan terus mundur.

"Salah satunya karena kebijakan pangan nasional yang tidak didasarkan pada data yang kuat dan mengikat semua pemangku kepentingan," tegas Anis.

Berdasarkan data The Food and Agriculture Organization (FAO), harga rata-

rata kedelai pada Desember 2020 tercatat sebesar US\$ 461 per ton atau naik 6 persen dibanding bulan sebelumnya yang tercatat US\$ 435 per ton.

Salah satu faktor utama penyebab kenaikan harga kedelai dunia adalah lonjakan permintaan kedelai dari China kepada Amerika Serikat selaku eksportir kedelai terbesar dunia. Pada Desember 2020 permintaan kedelai China naik dua kali lipat, yaitu dari 15 juta ton menjadi 30 juta ton.

Kedua, Anis menekankan harus ada upaya peningkatan produksi kedelai lokal dan pengendalian impor. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk mengoptimalkan kedelai dalam negeri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani kedelai.

"Sebagaimana kita tahu bahwa kondisi petani kedelai terlibas oleh kebijakan pasar bebas tahun 1995. Awalnya produksi lokal bisa memenuhi 70-75% kebutuhan kedelai, tetapi saat ini terbalik karena sekitar 70-75% kini dipenuhi dari impor," tutur Anis.

Selain kebijakan impor, faktanya pemerintah kesulitan menggenjot produksi kedelai dalam negeri. Kementerian Pertanian sempat menarget produksi kedelai pada 2019 bisa mencapai 2,8 juta ton untuk memenuhi kebutuhan yang diperkirakan mencapai 4,4 juta ton. Namun hingga Oktober 2019 hanya tercapai 480.000



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

"Kenaikan kedelai adalah salah satu dari masalah yang sebenarnya merupakan kejadian berulang. Dan ini juga harus diantisipasi untuk bahan pokok lainnya misalnya beras, telur, daging, cabe, bawang dan masih banyak produk pangan lainnya

ton atau 16,4% dari target. Pada 2018 juga sama, dari target 2,2 juta ton produksi kedelai, hanya terealisasi 982.598 ton.

Ketiga, legislator dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini menyoroti optimalisasi penggunaan Dana Desa. Salah satu evaluasi yang harus

dilakukan, terkait penggunaan Dana Desa untuk mengembangkan potensi desa. Program yang diselenggarakan dari dana desa seharusnya memiliki daya ungkit untuk membangkitkan ekonomi pedesaan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

GEJOLAK HARGA KEDELAI

Ketergantungan Impor yang Berdampak **Serius!**

Saat ini Pemerintah harus sadar bahwa ketergantungan impor pasti berdampak serius terhadap stabilitas harga dan ketahanan pangan kita, Bagaimana pemerintah seharusnya mengatasi ini:



Rafli: Jangan Anggap Remeh Persoalan Kedelai

Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus mampu mengatasi hal ini. Ini kemana Kemendag? jangan dianggap remeh-temeh persoalan ini. Keluhan dari perajin kedelai harus disikapi dengan langkah-langkah cepat. Konsumen sudah gelisah

tempe, apalagi pada masa pandemi ini harus ada prioritas untuk membantu ribuan usaha kecil menengah berbasis pemberdayaan produk lokal agar ekonomi nasional segera pulih



Johan Rosihan: Berdayakan Para petani

“Saya berharap Pemerintah segera mengambil kebijakan stabilisasi harga kedelai untuk menyelamatkan keberlangsungan usaha dari produksi tahu dan



Andi Akmal: Prioritas tinggi APBN Sektor Pangan dan Pertanian

Saya berharap pemerintah mulai membuat prioritas tinggi dalam menghadapi persoalan pangan dan pertanian ini. Bukti terhadap dukungan pemerintah di sektor pangan dan pertanian ini adalah, adanya alokasi APBN yang proporsional terhadap sektor pangan dan pertanian.



Nevi Zuairina: Berdampak pada UMKM

Jika harga kedelai naik, maka harga tahu dan tempe di masyarakat juga akan ikut naik. Dengan begitu kenaikan harga kedelai akan menimbulkan efek berganda, mengingat para pelaku UMKM juga menggunakan tahu dan tempe sebagai bahan baku produk makanan yang mereka jual.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Doa Bersama, PKS Bermunajat di tahun 2021

KUTIPAN

Jakarta -- Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Salim Segaf Aljufri mengungkapkan malam doa bersama di penghujung akhir tahun 2020 menjadi malam untuk memikirkan perubahan.

"Disamping hari ini adalah malam doa, malam kita bermunajat. Kita harus tau bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk tahun 2021. Apa itu? Perubahan," ucap Habib Salim dalam acara Doa Bersama untuk Indonesia Sehat, Kamis (31/12/2020) malam.

Habib Salim menjelaskan perubahan ini dapat terjadi karena dua sebab. "Pertama, orang terjadi perubahan ketika salah satu keluarganya sakit atau dirinya sakit. Apakah tersebut musibah, karena pelanggaran, banyakkah. Ada sebab tertentu yang membuat dirinya melakukan perubahan," jelas Habib.

Perubahan yang kedua, lanjut Habib Salim, adalah perubahan yang muncul dari

hati yang paling dalam.

"Serba perubahan pertama, contoh ketika datang musibah saja dia terjadi perubahan. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, kembali seperti semula lagi.

Nah ini perubahan yang hanya temporer saja," ungkap Habib.

Habib Salim mengingatkan perubahan yang muncul dari hati akan membawa sesuatu yang sangat positif.

Dai Nasional Ustadz Abdul Somad menambahkan nasihat lima sehat bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong 2021. Pertama sehat dari wabah penyakit Covid-19.

Kedua sehat dari penyakit ketidakadilan. Umat Islam diajarkan bersikap adil sebab dengan keadilan lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan.

"Bahkan dengan yang berbeda agama kita tetap diminta bersikap adil. Walaupun berbeda agama selama tidak mengusirmu dari kampung halaman berbuat baiklah dan bersikap adillah. Insyallah kita umat yang sehat dari ketidakadilan," cetus UAS.

Ketiga, sehat dari penyakit zalim. UAS mengingatkan agar manusia jangan sampai berbuat zalim sebab kezaliman akan menjadi kegelapan sampai hari kiamat.

Keempat, bangsa kita sehat dari penyakit Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). UAS menegaskan KKN tidak berlaku dalam Islam.

"Nabi SAW mengajarkan untuk urusan yang berat maka letakkan saudaranya. Untuk yang ringan, ajak sahabat. Tidak ada istilah KKN," terang UAS.

Terakhir, bangsa ini harus sehat dari penyakit moral dan maksiat. UAS mengingatkan agar umat takut pada perbuatan maksiat sebab jika terjadi azab bukan hanya yang berbuat maksiat yang merasakan dampaknya.

"Yang ditakutkan adalah saat orang yang berbuat maksiat merasa menang dan orang yang benar merasa salah untuk menegur yang maksiat. Insyallah selama ada amar ma'ruf nahi munkar, selama ada lisan yang tidak pernah takut kepada orang zalim meskipun memegang kekuasaan kita akan sehat dari penyakit maksiat ini," imbuh UAS



Habib Dr. SALIM SEGAF ALJUFRI, MA
Ketua Majelis Syuro PKS

Disamping hari ini adalah malam doa, malam kita bermunajat. Kita harus tau bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk tahun 2021



Refleksi Akhir Tahun 2020

FPKS DPR: Seluruh Indikator Kesejahteraan Belum Menggembirakan, Pemerintah Harus Kerja Lebih Keras

KUTIPAN

Jakarta (31/12) --- Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berharap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bekerja lebih keras mengatasi pandemi kesehatan masyarakat.

Grafik penyintas covid 19 menunjukkan kenaikan signifikan.

Akibat pandemi yang telah berlangsung setahun penuh seluruh indikator kesejahteraan rakyat juga memburuk. Hal ini menuntut kerja lebih keras lagi dari jajaran pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Jazuli sebagai evaluasi pemerintah di tahun 2020 dan menyambut tahun 2021.

Menurutnya, Pemerintah harus mengambil opsi kebijakan yang lebih tegas, tidak ambigu dan abu-abu antara kepentingan kesehatan, kemanusiaan, dan ekonomi seperti saat ini.

"Akibat kebijakan yang ambigu ditangkap publik secara

luas sebagai inkonsistensi. Dampaknya tidak jelas apa kebijakan yang berlaku antara yang dibolehkan dan dilarang sehingga sulit menerapkannya di lapangan, akibatnya banyak yang abai protokol kesehatan. Tingkat kematian (fatality rate) Indonesia tertinggi di Asia Tenggara," ungkap Jazuli.

Menurut Jazuli, masyarakat tidak bisa mendapat gambaran yang jelas bagaimana peta jalan yang komprehensif, sistematis, dan terukur dari kebijakan pemerintah mengatasi pandemi covid 19. Akibatnya pemerintah tidak bisa menjelaskan secara jelas dan optimis kapan pandemi ini akan

selesai diatasi. Prediksi yang disampaikan pemerintah pun berulang kali meleset.

Selain itu, dalam penilaian Fraksi PKS pemerintah tidak memiliki strategi yang komprehensif dalam penyediaan vaksin dan strategi vaksinasi. Terbukti dengan pembelian sejumlah obat Covid-19 yang terburu-buru di awal pandemi, kontroversi pembelian vaksin Sinovac yang belum lulus uji klinis, hingga kepercayaan rakyat yang rendah terhadap vaksin yang disediakan pemerintah.

Anggota Komisi I DPR ini membeberkan data-data indikator kesejahteraan rakyat yang memburuk tajam dalam setahun terakhir. Berdasarkan data BPS, pengangguran bertambah menjadi 9,77 juta orang pada Agustus 2020. Sebanyak 29,12 juta orang usia kerja terkena dampak pandemi. Angka kemiskinan pada Maret 2020 melonjak 1,63 juta orang



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Akibat kebijakan yang ambigu ditangkap publik secara luas sebagai inkonsistensi. Dampaknya tidak jelas apa kebijakan yang berlaku antara yang dibolehkan dan dilarang sehingga sulit menerapkannya di lapangan, akibatnya banyak yang abai protokol kesehatan. Tingkat kematian (fatality rate) Indonesia tertinggi di Asia Tenggara

menjadi 26,42 juta orang menurut BPS. Dan diprediksi jumlah angka kemiskinan hingga akhir 2020 mencapai 28,7 juta orang.

Di tengah kondisi rakyat yang sulit di atas, pemerintah seperti kehilangan sensitivitas. Pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS pada Mei 2020.

Pada perawatan kelas III, iuran Rp25.500 meningkat menjadi Rp42.000. Peserta kelas II, iuran sebesar Rp51.000 dinaikkan menjadi Rp100.000. Pada kelas I, iuran yang sebelumnya Rp80.000 dinaikkan sampai Rp150.000.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aleg PKS: Refleksi Komunikasi Politik 2020 Diwarnai Politik Kegaduhan

KUTIPAN

Yogyakarta (31/12) -- Tahun 2020 sudah di penghujung waktu. Banyak catatan atas kinerja dan komunikasi yang dilakukan pemerintah selama 1 tahun ini.

Sukamta, Anggota Komisi I DPR RI, Rabu (30/12) saat menjadi pembicara dalam sebuah talkshow yang diselenggarakan oleh RRI bertema Komunikasi Politik di Jakarta menyatakan, Refleksi komunikasi politik sepanjang tahun 2020 lebih banyak diwarnai dengan politik kegaduhan dan kegagalan pemerintah.

"Akibatnya persoalan utama alih-alih terselesaikan, Indonesia malah mengalami krisis ekonomi akibat pandemi," pengkasnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa kegaduhan ini muncul diawali dengan pernyataan-pernyataan para menteri yang membantu Presiden seperti Menkes yang

sempat terkesan menyepelakan ancaman Covid-19 saat awal pandemi saja.

"Mendagri juga sempat melontarkan wacana Pilkada tak langsung yang dianggap sebagai kemunduran demokrasi dalam konteks Indonesia. Menkumham juga sempat melontarkan pernyataan bahwa angka kriminalitas tinggi di daerah miskin yang seolah mendiskreditkan kalangan menengah ke bawah", urainya.

Juga pernyataan Menteri Agama, lanjutnya, yang misalkan ingin melakukan sertifikasi penceramah, larangan bagi ASN untuk memakai cadar atau bercelanda cingkrang.

"Menkopolkumham juga beberapa kali melontarkan

wacana yang membuat gaduh, misalkan soal Polisi Siber yang dikhawatirkan hanya akan memberangus kemerdekaan berpendapat bagi pihak yang mengkritik pemerintah," ujarnya.

Kita juga tidak lupa pernyataan Presiden Jokowi, lanjut Sukamta, yang dianulir oleh Menhub soal larangan mudik dan pulang kampung. Presiden Jokowi menyatakan bahwa yang dilarang mudik, sedangkan pulang kampung tidak dilarang.

"Menhub kemudian menegaskan bahwa mudik dan pulang kampung sama saja dilarang. Kita disuguhi tontonan komunikasi yang kurang kompak untuk level negara. Kegaduhan elit tersebut berimbas kepada kegaduhan di masyarakat. Sementara kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi. Uniknyanya, isu-isu yang sudah bertebaran dan membuat kegaduhan publik itu kemudian "diselesaikan" oleh seorang menteri yang terkesan mengerjakan banyak urusan," papar Sukamta.

Doktor lulusan Inggris ini mencatat banyaknya hoaks yang muncul adalah imbas dari komunikasi politik pemerintah yang buruk. Bisa jadi sumber hoaks adalah pemerintah sendiri karena menampakan kesimpangsiuran informasi dan isu-isu kebijakan dengan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kegaduhan. Tapi



H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Refleksi komunikasi politik sepanjang tahun 2020 lebih banyak diwarnai dengan politik kegaduhan dan kegagalan pemerintah. Akibatnya persoalan utama alih-alih terselesaikan, Indonesia malah mengalami krisis ekonomi akibat pandemi."

anehnya justru masyarakat yang dianggap sebagai sumber utama pembuat hoaks, dan terjadilah kriminalisasi rakyat dan tokoh masyarakat.

"Segepan permasalahan sedang mendera bangsa ini. Di bidang ekonomi, Indonesia resmi mengalami resesi ekonomi di kuartal III 2020

dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi minus 3,49%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 turun drastis dan jauh dari target, yakni pada kuartal I hanya mencatat pertumbuhan 2,97% dan kuartal II minus 5,32%.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Sepanjang 2020, Legislator PKS: Pengembangan Riset & Teknologi Jalan di Tempat

KUTIPAN

Jakarta (29/12) --- Selama tahun 2020 kinerja Pemerintah dalam pembangunan sektor riset, inovasi dan teknologi dinilai Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, masih jauh dari harapan.

Mulyanto menambahkan, peran Kemenristek sebagai regulator dan koordinator terciptanya produk-produk inovasi masih kurang terasa.

Menurut Mulyanto terdapat beberapa catatan kinerja Kemenristek di tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian Pemerintah. Diantaranya, belum berhasil mensinergikan sektor penelitian dengan sektor industri. Masing-masing sektor masih berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak tercipta produk inovasi domestik yang unggul di pasaran.

"Soal mobil Esemka, hingga hari ini ternyata zong. Rakyat hanya dikasih janji-janji palsu.

Padahal kalau Pemerintah serius, bisa saja dikembangkan menjadi industri mobil nasional," sindir Mulyanto.

Menurut Mulyanto, hingga saat ini Kemenristek belum berhasil membangun tradisi riset yang terhubung dengan tarikan industri. Pusat gravitasi pembangunan iptek masih didominasi peran Pemerintah, baik dari aspek kelembagaan, pendanaan maupun SDM.

Mulyanto memperkirakan 80% dari porsi pembangunan iptek nasional masih bertumpu pada peran Pemerintah. Sedangkan kurang dari 20% sisanya dikontribusikan oleh pihak non-Pemerintah.

Piramida terbalik, di banding negara-negara maju, bahkan negara tetangga seperti Malaysia atau Thailand.

"Jika infrastruktur dan suprastruktur riset didominasi Pemerintah maka hasilnya hanya akan jadi produk ilmu pengetahuan namun tidak bisa diproduksi untuk kesejahteraan rakyat," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Di sisi lain, Riset vaksin merah putih juga masih merangkak. Padahal, kata Mulyanto, keberadaan vaksin sangat dibutuhkan saat ini. Alih-alih memberi perhatian besar pada percepatan produksi vaksin dalam negeri Pemerintah malah sibuk mencari vaksin impor yang efektivitas serta imunogenitasnya belum teruji.

"Kemampuan dan ketrampilan tenaga peneliti Indonesia di bidang biomolekuler juga sangat mumpuni. Sayangnya sekali jika Pemerintah tidak memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para peneliti untuk menghasilkan vaksin produksi dalam negeri," terangnya.

Pemerintah, imbuhnya, terkesan pelit menyediakan anggaran penelitian. "Anggaran penelitian vaksin lebih kecil daripada anggaran tim buzzer. Ini kan memprihatinkan," singgung Mulyanto.

Catatan lain adalah dimuseumpkannya pesawat N250 Gatot Kaca. Peristiwa ini seolah menjadi penanda



Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

Jika infrastruktur dan suprastruktur riset didominasi Pemerintah maka hasilnya hanya akan jadi produk ilmu pengetahuan namun tidak bisa diproduksi untuk kesejahteraan rakyat

Pemerintah angkat tangan mengembangkan industri dirgantara nasional.

"Hal lain yang perlu menjadi catatan, hingga saat ini adalah soal Perpres BRIN yang sampai hari ini belum

diundangkan. Padahal Kementerian sudah berjalan lebih dari satu tahun. Ini kan aneh SDM dan anggaran tersedia, namun kelembagaannya tidak jelas" tandas Mulyanto.

Outlook Ekonomi 2021

Anggota FPKS: Ekonomi Indonesia Berpeluang untuk Pulih

Jakarta (30/12) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menyampaikannya peluang pulihnya kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2021

"Kalau melihat tren sejumlah indikator aktivitas ekonomi secara bulanan, telah terdapat peningkatan aktivitas ekonomi yang cukup baik terjadi di hampir seluruh sektor ekonomi. Dengan pola pertumbuhan seperti ini, maka proses pemulihan ekonomi Indonesia berpeluang berbentuk seperti huruf 'V' atau setidaknya 'U,'" tutur Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini.

"Hal tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi dapat berlangsung

lebih cepat atau krisis ini tidak semakin dalam", lanjut Anis.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menambahkan sejumlah lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berkisar pada level 4% sampai 6%.

"Pertumbuhan yang relatif tinggi ini tentunya karena faktor baselinanya yang memang rendah. Meski demikian potensi pertumbuhan ini masih berisiko tertarik kebawah akibat risiko pandemi yang masih bergerak eksponensial dan efektivitas kinerja pemerintah yang rendah," ujar dia.

Anis melanjutkan ada dua kebijakan utama yang akan mempengaruhi pencapaian outlook ekonomi di tahun 2021 nanti, yaitu vaksin dan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah.

"Banyak analisis telah mengaitkan antara pemulihan ekonomi dengan pelaksanaan vaksin Covid-19, dimana pemulihan ekonomi sangat bergantung pada keberhasilan vaksin," tandas dia.



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

Pertumbuhan yang relatif tinggi ini tentunya karena faktor baselinanya yang memang rendah. Meski demikian potensi pertumbuhan ini masih berisiko tertarik kebawah akibat risiko pandemi yang masih bergerak eksponensial dan efektivitas kinerja pemerintah yang rendah



*Selamat
Tahun Baru*

2021

Mari Perkokoh Iman
dan Perkuat Imun
Songsong Hari Depan
Lebih Baik

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Catatan Akhir Tahun Bidang Kesehatan

Tertatih Hadapi Pandemi, Tantangan Menjawab Keraguan Publik

KUTIPAN

Jakarta (31/12) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati memberikan catatan kebijakan kesehatan selama 2020

Mufida menyebut respons pemerintah terhadap Pandemi Covid-19 menjadi catatan besar. Ia menilai pemerintah terkesan meremehkan masuknya virus Covid-19. Mulai dari pernyataan virus tidak akan masuk, bisa sembuh sendiri dan telatnya menyatakan sebagai bencana nasional.

Ditambah lagi, saat awal-awal pemerintah justru mempromosikan wisata dengan berbagai insentif. Dibanding negara-negara tetangga, Indonesia termasuk yang paling akhir dalam menutup kedatangan dari negara-negara yang sudah terjadi pandemi covid-19.

"Ketidaksigapan ini berakibat pada langkanya Alat Pelindung Diri, kurangnya lab pemeriksaan spesimen, kurangnya alat kesehatan seperti ventilator dan minimnya

kesiapan RS untuk penanganan Covid," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (31/12/2020).

Pada pertengahan, kampanye new normal yang salah kaprah hingga tidak sinkronnya pemerintah pusat dan daerah membuat grafik konfirmasi positif Covid terus menanjak. Hingga 10 bulan sejak diumumkannya kasus pertama, Indonesia belum lepas dari gelombang pertama.

"Akibatnya tenaga kesehatan kita kolaps. Selama 10 bulan pandemi sampai 28 Desember, 507 tenaga medis telah gugur dalam menjalankan tugasnya dan terbanyak justru di bulan Desember sebanyak 98 orang," ungkap Mufida.

Persoalan bukan mereda saat rencana penggunaan

vakzin Covid-19. Pemerintah sudah mendatangkan 3 juta vakzin sinovac pada saat uji klinis tahap 3 vakzin ini belum keluar. Seturut dengan label keahalalannya.

"Puncaknya terjadi pergantian Menteri Kesehatan sebagai salah satu strategi penanganan Pandemi. Presiden menunjuk seorang yang lama kekecimpung di dunia bisnis keuangan. Presiden mungkin lebih menilai bahwa prblm penanganan covid termasuk masalah vakzin ada di sisi manajerialnya. Apalagi persaingan untuk mendapatkan vakzin yang diperebutkan seluruh dunia memerlukan pendekatan bisnis," kata dia.

Mufida menilai, pendekatan penanganan pandemi bukan hanya soal vaksinasi semata. PR menteri kesehatan yang baru, ujar dia, adalah menjawab keraguan publik untuk bisa mengendalikan pandemi covid ini lebih baik dibanding sebelumnya.

"Membuat kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk mengendalikan penyebaran covid-19,



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI

Pekerjaan Menteri Kesehatan bukan hanya berkuat pada penanganan pandemi semata. Angkat stunting dan angka kematian ibu dan anak yang tinggi juga mesti mendapat porsi perhatian.

meningkatkan testing-tracing-treatment, menjamin ketersediaan APD dan alkes yang dibutuhkan, menurunkan positive rate yang secara nasional saat ini di kisaran 15 persen dan death rate yang juga masih cukup tinggi dan tentu mendatangkan vakzin yang aman dan teruji," kata Mufida.

Mufida mengingatkan pekerjaan Menteri Kesehatan bukan hanya berkuat pada penanganan pandemi semata. Angkat stunting dan angka kematian ibu dan anak yang tinggi juga mesti mendapat porsi perhatian.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Refleksi Akhir Tahun 2020

Johan Sebut Kinerja Sektor Tanaman Pangan Belum Perbaiki Kesejahteraan Petani

KUTIPAN

Sumbawa (30/12) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengevaluasi kinerja Pemerintah khususnya sektor tanaman pangan sepanjang tahun 2020 dari sisi capaian produksi padi yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya

begitu juga dengan luas panen tanaman padi hanya berkisar 9.871 Ha yang jauh lebih rendah dibanding tahun 2019 yang mencapai 10.678 Ha.

"Sementara itu pada Bulan Januari, Februari dan Juni tahun 2020 ini telah terjadi defisit produksi beras karena produksi yang dihasilkan lebih rendah dari kebutuhan konsumsi beras secara nasional", ujar Johan.

Anggota Komisi IV DPR RI ini juga menyoroti rendahnya capaian realisasi program dan kegiatan tanaman pangan selama tahun 2020 ini, persentase pelaksanaan program hanya mencapai 67,8 persen

sementara itu serapan anggaran per Oktober 2020 lalu hanya berkisar 56 persen.

Johan menilai upaya percepatan anggaran dari tanaman pangan belum berhasil walaupun sudah ada tambahan anggaran ABT sebesar Rp 1,046 Triliun.

"Hal ini perlu menjadi catatan kritis dari kinerja pemerintah karena tanaman pangan merupakan subsector yang sangat penting bagi kemajuan dunia Pertanian kita", tegas Johan.

Politikus PKS ini memaparkan bahwa pada tahun anggaran 2020 ini telah dialo-

kasikan anggaran biaya tambahan (ABT) untuk perluasan areal tanam baru tanaman padi dengan target penanaman seluas 250.000 Ha.

Namun Johan menilai upaya tersebut agak terlambat mengingat pelaksanaannya baru mau dilaksanakan pada rencana waktu tanam dimulai pada bulan Oktober 2020 lalu.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini menilai kinerja pemerintah khususnya sector tanaman pangan pada tahun 2020 ini belum berhasil memperbaiki kesejahteraan petani.

"Walaupun sektor ini telah mampu membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional pada masa pandemi ini. Sektor tanaman pangan tumbuh paling baik pada masa pandemic ini dibandingkan sektor lainnya", tutur Johan.

Selanjutnya Johan menggarisbawahi bahwa NTP Pangan sebagai indikator kesejahteraan petani terus mengalami penurunan.

"Pada Januari 2020 NTP

**H. JOHAN ROSIHAN, S.T.**


Anggota Komisi IV DPR RI

"Pemerintah harus segera membuat terobosan baru ke depan agar produksi tanaman pangan meningkat dan petani semakin sejahtera."

tanaman pangan sebesar 104,21 dan terus mengalami penurunan drastis hingga Bulan Mei 2020 hanya sebesar 100,38 dan lebih turun lagi pada Bulan Juli 2020 lalu yaitu sebesar 100,17", urai Johan.

Atas situasi ini, Johan meminta pemerintah untuk bisa meningkatkan kinerja sector tanaman pangan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Selengkapnya di fraksi.pks.id

Sektor Perikanan Belum Maksimal, **Catatan Slamet** untuk KKP Selama Tahun 2020

● 
Jakarta (02/01) ---
Anggota Komisi IV
DPR RI dari Fraksi
Partai Keadilan
Sejahtera (F-PKS)
Slamet I,

Slamet menilai, dengan potensi laut yang sangat besar, KKP dirasa belum mampu menjadikan sektor perikanan ini menjadi sektor utama yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

"Sangat disayangkan sektor perikanan seolah-olah masih menjadi sektor pelengkap yang kelihatannya besar namun sumbangsuhnya masih kecil," kata Slamet dalam keterangan tertulisnya, Jumat (01/01/2021).

Slamet menyayangkan anggaran di Ditjen Penguatan Daya Saing KKP yang relatif

terbatas. Padahal Direktorat ini menjadi motor penggerak untuk membunikan setiap inovasi yang sudah dihasilkan di beberapa lembaga penelitian dan perguruan tinggi.

"Vietnam yang hanya memiliki sepertiga dari luas laut Indonesia, tapi justru unggul dari segi ekspor produk perikanan," jelas Slamet.

Selain itu, Slamet juga mengatakan perlu adanya revitalisasi dan peningkatan kualitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Indonesia. Slamet memaparkan bahwa sebagian besar provinsi masih memiliki jumlah UPI di bawah 1.000 unit.

"Harusnya ditjen PDS ini anggarannya diperbesar untuk menunjang hilirisasi produksi perikanan yang melimpah, sehingga bisa memberi nilai tambah bagi sektor perikanan serta meningkatkan jumlah UMKM perikanan di seluruh wilayah Indonesia," tegasnya.



drh. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI

Dengan potensi laut yang sangat besar, KKP dirasa belum mampu menjadikan sektor perikanan ini menjadi sektor utama yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Sangat disayangkan sektor perikanan seolah-olah masih menjadi sektor pelengkap yang kelihatannya besar namun sumbangsuhnya masih kecil



PKS

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kreatif, Atraktif, Substantif



Ancaman Varian Baru Covid-19

Toriq: Mengapa Pintu Masuk Indonesia Tak Segera Ditutup?

KUTIPAN

Tasikmalaya (30/12) -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia resmi menutup sementara seluruh pintu kedatangan Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia pada awal Januari 2021, Senin, (28/12/2020).

Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi atas kemunculan varian baru virus corona (Covid-19) yang telah terdeteksi di sejumlah negara.

Namun Anggota Komisi I Toriq Hidayat mempertanyakan mengapa penutupan tersebut efektif dilakukan pada 1 Januari 2021.

"Kalau ancaman bahaya varian baru virus corona sudah nyata dan serius, kenapa pintu kedatangan WNA tidak langsung ditutup? Tidak perlu menunggu sampai 1 Januari 2021", ungkapnya.

Menurut Politikus PKS ini, penutupan yang baru dilakukan pada 1 Januari 2021 oleh Pemerintah RI, memberi

peluang bagi WNA untuk masuk ke Indonesia 4 hari kedepan. Sekaligus membuka potensi masuknya varian baru virus corona (Covid-19) ke Indonesia.

"Pemerintah harus berusaha keras mengantisipasi dan memastikan varian baru virus corona tersebut tidak masuk ke Indonesia, yang akan dibawa oleh WNA melalui pintu-pintu masuk Indonesia baik darat, laut dan udara paska libur akhir tahun ini", tegas Toriq.

Senada dengan Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban, Toriq mengatakan varian baru virus corona atau SARS-CoV-2 yang ditemukan di Inggris lebih

menular.

"Penularan Varian baru virus corona B117 ini bisa mencapai 71 persen lebih cepat. Namun para Ahli menyatakan varian baru virus corona ini tidak lebih mematikan"katanya.

Namun demikian menurut Toriq angka Covid-19 di Indonesia hari ini, telah mencapai 719 ribu kasus. Janganlah lagi diperparah oleh varian baru virus corona yang penularannya lebih cepat. Oleh karenanya Pemerintah harus cepat mengantisipasi.



"Pemerintah harus berusaha keras mengantisipasi dan memastikan varian baru virus corona tersebut tidak masuk ke Indonesia, yang akan dibawa oleh WNA melalui pintu-pintu masuk Indonesia baik darat, laut dan udara paska libur akhir tahun ini"



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Drone Kapal Selam Asing Masuk Wilayah Indonesia

Aleg PKS: Pemerintah Harus Perbaiki Sistem Keamanan Teritori

KUTIPAN

Yogyakarta (02/01) — Sebuah drone bawah air ditemukan nelayan di dekat Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan.

Drone yang diduga milik Cina ini saat ini telah diamankan di Pangkalan Angkatan Laut di Makassar.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta mengatakan, Pemerintah perlu segera menyelidiki untuk mengungkap asal usul drone.

Jika drone tersebut terbukti milik Cina atau negara lain, maka Pemerintah harus melakukan protes keras dan melakukan tindakan diplomatik yang tegas.

"Drone bawah air tersebut sudah masuk sangat dalam ke wilayah Indonesia. Ini sinyal bahwa selama ini wilayah laut kita sangat mudah diterobos pihak asing. Sangat mungkin selama ini sudah banyak drone yang berkeliaran di wilayah

Indonesia dan mengambil data-data penting geografis dan potensi laut Indonesia. Artinya keamanan nasional kita sangat rentan. Pemerintah harus serius mengungkap asal usul drone tersebut," terang Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyorot lemahnya sistem keamanan teritori Indonesia. Menurutnya hal ini menunjukkan kemampuan pertahanan Indonesia tertinggal dari sisi teknologi.

"Ini pekerjaan rumah Pak Menhan untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh. Indonesia bisa melakukan kerjasama dengan beberapa negara lain untuk alih teknologi selain tentunya dengan mendorong riset nasional untuk pengembangan teknologi yang

mendukung sistem pertahanan yang handal. Lebih dari itu pemerintah perlu segera perbaiki sistem keamanan teritori, agar kejadian drone yang menyelundup ini tidak terulang lagi", tegas Anggota Komisi 1 DPR RI ini.

Selanjutnya Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga meminta TNI Angkatan Laut dan Bakamla lebih memperkuat patroli laut terutama di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia.

"Ketegangan di Laut Cina Selatan yang melibatkan Cina, Amerika Serikat, Australia dan beberapa negara ASEAN pasti akan berimbas ke keamanan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang berada di zona ketegangan bisa dimanfaatkan oleh negara lain yang sedang berkonflik. Tentu kita tidak mau wilayah kita diobok-obok pihak asing. Oleh sebab itu kewaspadaan harus ditingkatkan dengan melakukan patroli secara ketat," tutup Sukamta.



H. SUKAMTA, Ph.D
Anggota Komisi 1 DPR RI

Drone bawah air tersebut sudah masuk sangat dalam ke wilayah Indonesia. Ini sinyal bahwa selama ini wilayah laut kita sangat mudah diterobos pihak asing. Sangat mungkin selama ini sudah banyak drone yang berkeliaran di wilayah Indonesia dan mengambil data-data penting geografis dan potensi laut Indonesia.



Pelarangan FPI, Mardani Ali Sera: Sampaikan Sejumlah Catatan Untuk Pemerintah

KUTIPAN

Jakarta (30/12) -- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera memberikan beberapa catatan penting mengenai Pelarangan FPI, Senayan, Rabu (30/12/2020).

Mardani mengingatkan semua untuk bekerja dalam koridor hukum. Artinya, semua tindakan baik Pemerintah, FPI dan semua pihak harus berbasis landasan konstitusi.

"Di negara demokrasi semua pihak punya hak untuk menyatakan pendapat dan punya kebebasan berkumpul dan berserikat," jelas Mardani.

Ia juga menegaskan, bahwa FPI punya hak untuk berkumpul dan berserikat. Pelarangan FPI bisa ditanggapi dalam koridor negara hukum dan negara demokratis.

"Upaya pelarangan atau pembubaran ormas sebetulnya bentuk gagalannya negara membina dan menjadikan ormas sebagai modal sosial yang sangat berguna bagi pembangunan bangsa," tegas Mardani.



Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI

FPI punya hak untuk berkumpul dan berserikat. Pelarangan FPI bisa ditanggapi dalam koridor negara hukum dan negara demokratis. Upaya pelarangan atau pembubaran ormas sebetulnya bentuk gagalannya negara membina dan menjadikan ormas sebagai modal sosial yang sangat berguna bagi pembangunan bangsa



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

HARGA KEDELAI MEROKET 5 RIBU UKM MOGOK

Harga Tahu Tempe Naik Mulai Senin

Produsen tahu tempe mogok
produksi **1-3 Januari 2021**
akibat harga kedelai naik

Kenaikan harga kedelai
akibat dari meredanya
ketegangan perang dagang
antara **AS** dan **Cina**

Harga kedelai naik
dari **Rp 7.200** menjadi
Rp 9.200 per kilogram



Harga tahu tempe mulai naik
Senin, 4 Januari 2021

Ketua Gakoptindo Syarifudin
memperkirakan **harga tempe**
dan **tahu** di pasar bakal **naik**
hingga **20 persen** untuk
menutup lonjakan biaya
produksi

Solusi PKS :
berdayakan petani lokal !



Johan Nilai Kenaikan HET Pupuk Bersubsidi sebagai Kado Pahit bagi Petani

KUTIPAN

Sumbawa (04/01) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menilai kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 49 tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020

yang telah menetapkan harga baru HET (Harga Eceran Tertinggi) beberapa jenis pupuk bersubsidi sektor Pertanian sebagai Langkah yang keliru dan merupakan kado pahit bagi petani saat memasuki tahun baru 2021 ini.

Johan menganggap pemerintah tidak sensitif terhadap penderitaan dan beban petani pada masa pandemi ini.

"Saya sangat prihatin dengan kebijakan ini karena berakibat memberatkan petani dan semakin memukul daya beli petani kita pada masa pandemi ini," tutur Johan.

Politisi PKS ini berharap semestinya pemerintah fokus membantu petani agar semakin produktif melakukan kegiatan usaha tani dengan cara menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi di lapangan agar tidak langka dan mudah

didapat, mengantisipasi berbagai permainan pupuk yang telah merugikan petani serta memperbaiki pola manajemen distribusi pupuk dan pengawasan di lapangan.

"Saya minta pemerintah cepat mengatasi persoalan pupuk yang terus terjadi setiap tahun dan bukan malah menambah beban petani dengan menaikkan HET pupuk bersubsidi pada awal tahun 2021 ini", cetus Johan.

Wakil rakyat dari Dapil NTB 1 ini mengingatkan Pemerintah agar segera bertindak mengatasi fenomena hilangnya pupuk bersubsidi di lapangan, apalagi Ketika waktu musim tanam tiba serta mengantisipasi berbagai kesulitan yang dihadapi petani seperti kartu tani yang menimbulkan banyak persoalan di lapangan.

"Pemerintah harus ingat

bahwa subsidi pupuk adalah hak petani yang sesuai dengan amanat konstitusi, jadi subsidi pupuk untuk petani tujuannya adalah melindungi petani agar produktivitasnya meningkat dan pemerintah tidak boleh menambah beban petani dengan menaikkan HET pupuk bersubsidi," papar Johan.

Legislator yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini dengan tegas meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan menaikkan HET.

"Beberapa jenis pupuk bersubsidi, seperti HET Urea yang semula Rp 1800,- per kilogram yang telah dinaikkan Rp 450,- sehingga harganya menjadi Rp 2.250,- per kilogram, demikian juga dengan beberapa jenis pupuk lainnya yang juga mengalami kenaikan," ujar Johan.

Masih banyak cara lain untuk mengatasi carut marutnya persoalan pupuk bersubsidi yang bisa dilakukan Pemerintah.

"Dan yang paling penting adalah pemerintah harus mampu bersinergi dengan semua stakeholder Pertanian dan semua instansi lainnya dalam merumuskan kebijakan pupuk ini," tutup Johan.



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.
Anggota Komisi IV DPR RI

"Semestinya pemerintah fokus membantu petani agar semakin produktif melakukan kegiatan usaha tani dengan cara menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi di lapangan agar tidak langka dan mudah didapat, mengantisipasi berbagai permainan pupuk yang telah merugikan petani serta memperbaiki pola manajemen distribusi pupuk dan pengawasan di lapangan.

Hermanto Ingatkan Menteri Pertanian: Pengadaan Alsintan Agar Disertai Fasilitas Perawatan

KUTIPAN

Padang (05/01) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto meminta Kementerian Pertanian agar dalam pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) tahun 2021 disertai dengan fasilitas pelayanan dan perawatan yang memadai.

Hal itu, menurut Hermanto, sangatlah penting agar alsintan tersebut bisa memberikan manfaat dalam jangka waktu yang lama.

"Pastikan pemenang tender memberikan pelayanan purna jual yang sigap dan menyediakan sukucadang di daerah dimana alsintan itu berada," papar Hermanto menanggapi pernyataan Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo yang akan menyiapkan 34.356 unit alsintan untuk menggenjot produktivitas pertanian di tahun 2021.

Dari hasil monitoring, lanjut Hermanto, perusahaan pemenang tender yang tidak punya cabang di Sumatera

Barat tidak sigap dalam memberikan pelayanan purnajual di masa garansi. Pelayanan dimaksud bisa berupa peragaan penggunaan alsintan di lapangan oleh operator yang ditunjuk perusahaan pengadaan dan bisa juga berupa perbaikan atas segala jenis kerusakan alsintan.

"Kalaupun memberikan pelayanan, waktu pemenuhannya lama. Di lapangan, petani membutuhkan pelayanan cepat. Jika tidak cepat, petani kehilangan momentum menanam padi," tutur legislator FPKS ini.

"Perusahaan pengadaan alsintan yang tidak sigap apalagi tidak memberikan pelayanan selama masa garansi

harus diberi sanksi," tandas Hermanto.

Demikian juga pelayanan purna jual di luar masa garansi terutama terkait ketersediaan sukucadang.

"Sering petani mengeluh tidak tersedianya suku cadang di daerahnya. Karena suku cadang tidak tersedia, akhirnya alsintan dibiarkan tidak beroperasi akhirnya rusak jadi besi tua," ungkap Hermanto.

Yang tidak kalah penting, kata Hermanto adalah keberadaan bengkel alsintan di setiap Wilayah.

"Alsintan perlu perawatan berkala sehingga perlu menyediakan bengkel berjalan dan dilengkapi mekanik untuk melayani satu kawasan Kabupaten/Kota, agar Alsintan dapat terawat dan umur teknis lebih lama sehingga operasi lebih optimal," papar Hermanto.

"Alsintan berperan penting dalam mendukung tercapainya swasembada pangan.

Keberadaan bengkel yang mudah dijangkau tentu sangat mendukung peran tersebut," pungkas legislator dari Dapil Sumbang I ini.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M.

Anggota Komisi IV DPR RI

Dari hasil monitoring, perusahaan pemenang tender yang tidak punya cabang di Sumatera Barat tidak sigap dalam memberikan pelayanan purnajual di masa garansi. Pelayanan dimaksud bisa berupa peragaan penggunaan alsintan di lapangan oleh operator yang ditunjuk perusahaan pengadaan dan bisa juga berupa perbaikan atas segala jenis kerusakan alsintan.



Anggota FPKS Minta Pemerintah **Serius Tangani Pencemaran Laut Akibat Limbah Medis Covid-19**

KUTIPAN

Jakarta (06/01) — Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin terus memantau keseriusan Pemerintah dalam menangani pencemaran laut akibat limbah medis covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian lembaga Ocean Conservancy, sejak pandemi Covid-19 dimulai setiap bulan manusia menghasilkan 129 miliar sampah masker dan 65 miliar sarung tangan sekali pakai.

Politisi PKS ini mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan instrumen mengatasi persoalan sampah ini. Sebab persoalan lingkungan ini, dampaknya bukan saja pada saat ini saja, namun berakibat timbulnya berbagai persoalan pada jangka waktu yang sangat lama.

"Sebagian besar sampah tidak dibuang dengan benar dan berakhir di laut, hal ini memperparah pencemaran dilaut. Kita semua mesti menyadari, bahwa persoalan

laut ini sama pentingnya dengan persoalan oksigen di udara yang selama ini di topang hutan-hutan yang ada di muka bumi. Jangan sampai kita abai yang ujungnya terganggunya ekosistensi kehidupan makhluk hidup di bumi, terutama manusia yang menjadi pengatur utama kelangsungan kehidupan di dunia," jelas Akmal.

Akmal melihat, bahwa Pencemaran di laut ini akan menjadi bom waktu ekologis yang akan menjadi ancaman bagi ekosistem. Untuk itu ia selalu berkoordinasi dengan mitra komisinya untuk saling bekerja sama mengatasi persoalan sampah di laut.

Akmal menambahkan, bahwa ancaman saat ini yang ada di hadapan kita adalah,

Masker dan sarung tangan dapat menjadi pembunuh bagi ekosistem laut seperti paus, lumba-lumba, dan lain-lain. Untuk itu, semua lembaga negara yang bertupoksi pada persoalan sampah laut ini tidak boleh meremehkan limbah medis yang memang sangat luar biasa banyak akibat pandemi.

"Mungkin sampah medis ini terlihat persoalan kecil bagi kita. Padahal sesungguhnya, sampah medis ini dapat menjadi persoalan besar bagi lingkungan kita di seluruh belahan bumi ini," ujar Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini juga dalam setiap kesempatan bertemu kelompok-kelompok masyarakat pesisir selalu meminta bantuan agar berkontribusi pada penanggulangan sampah laut. Dengan adanya dukungan masyarakat, tugas berat pemerintah akan semakin ringan dalam menyelesaikan sampah laut. Untuk itu, edukasi dan pembinaan masyarakat perlu dibangun pemerintah dengan masyarakat pesisir yang bekerja di seluruh garis pantai Indonesia, untuk dapat beraktivitas menangani



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.
Anggota Komisi IV DPR RI

"Mungkin sampah medis ini terlihat persoalan kecil bagi kita. Padahal sesungguhnya, sampah medis ini dapat menjadi persoalan besar bagi lingkungan kita di seluruh belahan bumi ini,"

sampah laut. Pendidikan agar tidak membuang sampah di laut menjadi sangat penting.

"Untuk mengatasi persoalan sampah laut ini, memang perlu didukung dengan kesadaran yang tinggi dari masyarakat. Masyarakat harus mengetahui bahwa limbah medis yang terbuang ke laut sangat berbahaya bagi kehidupan di laut. Kerjasama

dan koordinasi antar Kementerian Lembaga, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pusat Studi Oceanografi di LIPI juga sangat diperlukan. Kerjasama dan dukungan data yang baik akan memastikan kebijakan dan langkah yang tepat dalam penanganan limbah Covid-19," tutup Akmal



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

WOW! HET PUPUK NAIK LAGI KADO PAHIT UNTUK PETANI!

Lewat Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020, Pemerintah telah menetapkan **harga baru** **Harga Eceran Tertinggi (HET)** beberapa jenis pupuk bersubsidi sektor pertanian.

Jenis Pupuk	Harga Lama (Per Kg)	Harga Baru (Per Kg)	Harga Per Karung
Urea	Rp 1.800,- → Rp 2.250,-	Rp 2.250,-	Rp 112.500,-
ZA	Rp 1.400,- → Rp 1.700,-	Rp 1.700,-	Rp 85.000,-
SP-36	Rp 2.000,- → Rp 2.400,-	Rp 2.400,-	Rp 120.000,-
NPK PHONSKA	Rp 2.300,- → Rp 2.300,-	Rp 2.300,-	Rp 115.000,-
PETROGANIK	Rp 500,- → Rp 800,-	Rp 800,-	Rp 32.000,-



Sejalan Dengan Program Kampanye, PKS Mendukung SIM di Gratiskan

KUTIPAN

Jakarta (04/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menanggapi Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia baru saja diterbitkan

Didalamnya, lanjut pria yang akrab disapa SJP, telah diatur 31 jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Kepolisian RI, dimana salah satu diantaranya adalah pengaturan biaya penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang baru & perpanjangannya.

"Yang menarik adalah adanya pasal yang dapat memberikan keringanan biaya hingga Rp 0 atas dasar pertimbangan tertentu bagi orang-orang yang akan membuat atau memperpanjang SIM, dengan catatan keringanan biaya pembuatan dan perpanjangan SIM ini ditetapkan terlebih dahulu oleh Kapolri dan disetujui oleh Kementerian Keuangan," terang Suryadi.

Hal ini, imbuhnya, tentu sejalan dengan usulan PKS

yang memperjuangkan SIM seumur hidup dimana salah satu tujuannya adalah menghilangkan biaya perpanjangan SIM dan memudahkan masyarakat dalam beraktivitas.

"Seperti diketahui proses perpanjangan SIM terkadang membutuhkan waktu akibat terjadinya antrian. Hal ini karena pada saat perpanjangan dilakukan tes kesehatan dan pengambilan ulang foto pemilik SIM tersebut untuk dicetak pada SIM yang baru," ungkapnya.

Di masa pandemi, kata Suryadi, hal tersebut sangat menyulitkan baik dari segi biaya, waktu maupun kesehatan. Masyarakat harus menisihkan sebagian uangnya dan merelakan waktu

produktifnya untuk mengantri dimana antrian ini pun dapat menimbulkan resiko kesehatan.

"Padahal saat ini banyak sekali orang yang mencari nafkah sebagai pengemudi atau profesi lainnya yang membutuhkan keahlian mengemudi. Dimana orang-orang tersebut biasanya memiliki kondisi ekonomi yang berada pada garis kemiskinan atau rentan miskin, terkhusus bagi orang yang menjadikan sepeda motor sebagai alat produksi," pungkasnya.

Selain alasan tersebut, lanjut Anggota Komisi V DPR RI ini, dengan asumsi bahwa proses awal penerbitan SIM berjalan dengan baik, maka Fraksi PKS menilai bahwa seseorang justru akan semakin mahir dalam mengemudi seiring berjalannya waktu, sehingga perpanjangan SIM menjadi tidak relevan.

"Namun demikian agar kelayakan mengemudi seseorang dapat terpantau dari segi kesehatan, maka FPKS mengusulkan adanya ketentuan yang mengatur terkait pemberian notifikasi secara online dan otomatis dari Rumah Sakit ke database Kepolisian apabila seseorang dianggap



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.

Anggota Komisi V DPR RI

tentu sejalan dengan usulan PKS yang memperjuangkan SIM seumur hidup dimana salah satu tujuannya adalah menghilangkan biaya perpanjangan SIM dan memudahkan masyarakat dalam beraktivitas.

kehilangan kemampuan mengemudinya. Misalnya ketika seseorang mengalami kecelakaan yang menyebabkan hilangnya indera penglihatan atau anggota tubuh lainnya yang penting, atau saat seseorang melakukan pemeriksaan tertentu dan

kemudian ditemukan hal-hal yang terkait dengan kehilangan kemampuan mengemudinya, maka dapat dilaporkan secara online. Sehingga hanya orang-orang dengan masalah kesehatan tertentu saja yang perlu melalui tahapan evaluasi perpanjangan SIM", papar SJP.



***Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan***

Amin Ak Desak KPPU **Selidiki** Dugaan Praktik Penimbunan Kedelai

KUTIPAN

Surabaya (06/01) --- Pemerintah kembali gagal mengatasi lonjakan harga kedelai impor yang kemudian berdampak pada keberlangsungan usaha para pengrajin tahu dan tempe.

Tren kenaikan harga kedelai di pasar global sendiri sudah muncul sejak Agustus tahun lalu, yang semestinya bisa diantisipasi oleh pemerintah.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki dugaan praktik ilegal oleh importir kedelai dengan menimbun stok kedelai disaat pasokan kedelai di pasar global menipis.

Jika terbukti terjadi penimbunan stok, Amin mendesak agar KPPU dan Kementerian Perdagangan mencabut izin impor perusahaan pelakunya.

"Persoalan kedelai ini kan selalu berulang sejak satu dekade terakhir. Persoalannya sama, yaitu instabilitas harga yang membuat pelaku usaha tempe dan tahu yang didomi-

nasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpukul kenaikan harga," beber Amin.

Dugaan penimbunan stok kedelai itu beralasan mengingat hanya ada tiga importir yang menguasai 66,3 persen kuota impor kedelai, sehingga sangat berpeluang untuk mengontrol pasokan.

Amin mendesak agar KPPU menyelidiki dugaan importir yang sengaja menahan pasokan kedelai.

Selain itu, Amin Ak juga mendesak pemerintah untuk segera menyusun solusi jangka pendek dan jangka panjang agar persoalan kedelai ini tuntas. Untuk jangka pendek, pemerintah harus segera mencari pasokan kedelai dari luar Amerika Serikat yang selama ini menjadi sumber terbesar pasokan kedelai di

dalam negeri.

"Sebanyak 95% lebih pasokan kedelai impor berasal dari negeri Paman Sam. Persoalannya, untuk periode 2020/2021 ini, kedelai AS sudah diborong China. Indonesia harus cari pemasok lain, karena panen kedelai lokal masih dua bulan lagi. Itupun jumlahnya sedikit," tegas Amin.

Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), hingga 10 Desember 2020 lalu, China telah membeli 58 persen kedelai dari Amerika Serikat untuk kontrak 2020-2021. China membutuhkan pasokan yang besar untuk kebutuhan pakan babi pasca peternakan mereka pulih dari wabah flu babi.

Data dari S&P Global Platts Analytics menyebutkan, terjadi lonjakan permintaan ekspor kedelai AS yang diperkirakan meningkat 31 persen (year-on-year) menjadi 59,87 juta metrik ton.

Hal itu memicu kenaikan harga kedelai di pasar global, dimana rata-rata harga kedelai pada Desember 2020 mencapai US \$ 461 per ton, naik 6% dari harga November. Sedangkan rata-rata harga kedelai



Foto: detik.com

AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

"Persoalan kedelai ini kan selalu berulang sejak satu dekade terakhir. Persoalannya sama, yaitu instabilitas harga yang membuat pelaku usaha tempe dan tahu yang didominasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpukul kenaikan harga."

Amerika pada September 2020-Agustus 2021 sekitar US \$ 10 per bushel, atau naik 17 persen (year-on-year).

"Ini tantangan bagi Menteri Perdagangan yang

baru, M Luthfi untuk mengatasi pasokan kedelai dengan mencari sumber-sumber baru dari negara di luar AS," ujar Amin.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Tahu Tempe Langka, Anggota FPKS: Kemana Kemendag?

KUTIPAN

Kondisi ini dikhawatirkan berimbas meluas ke berbagai daerah. Hilangnya stok kedelai akibat imbas mogok produksi di kalangan perajin. Ketiadaan tahu dan tempe di pasaran merupakan imbas dari bentuk protes terhadap kenaikan harga kedelai dari Rp7.200 menjadi Rp9.200 per kilogram.

Jakarta (03/01) — Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Rafli, meminta Kementerian Perdagangan untuk mampu meredakan keresahan konsumen terkait hilangnya stok tahu dan tempe di lapak pedagang dalam dua hari ini.

Menurut Rafli, kondisi ini dikhawatirkan berimbas meluas ke berbagai daerah. Hilangnya stok kedelai akibat imbas mogok produksi di kalangan perajin.

Ketiadaan tahu dan tempe di pasaran merupakan imbas dari bentuk protes terhadap kenaikan harga kedelai dari

Rp7.200 menjadi Rp9.200 per kilogram.

"Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus mampu mengatasi hal ini. Ini kemana Kemendag? jangan dianggap remeh-temeh persoalan ini. Keluhan dari perajin kedelai harus disikapi dengan langkah-langkah cepat. Konsumen sudah gelisah," terang politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Minggu (03/01).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun menegaskan, sejak komoditas berbahan baku kacang kedelai

itu hilang dari pasaran, banyak pedagang beralih menjual kentang goreng dan sayuran.

"Masyarakat tentu berharap, produsen kembali memasok tahu dan tempe sebab penggemar makanan tersebut cukup tinggi di warungnya. Namanya orang Indonesia kan favoritnya tahu tempe," terangnya.

Rafli pun berpesan kepada produsen agar harga tahu tempe bisa stabil, namun kalau pun harus naik harganya tetap wajar dan bisa terjangkau.

"Walaupun harganya naik, yang penting ada. Yang penting naiknya terjangkau," jelasnya.

Dari laporan yang diterima Rafli, terhitung mulai 1 hingga 3 Januari 2021, sejumlah perajin sto produksi. Ada sekitar 5.000 pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memproduksi tahu dan tempe, sepagat untuk mogok produksi.

"Jika setiap harinya produsen memasak kebutuhan tahu dan tempe di Jakarta sebanyak 500 hingga 600 ton lalu meng'nilang, bagaimana dengan daerah lain. Kemendag jangan diam saja, harus ada langkah dan insiatif cepat," tegas politisi asal Dapil Aceh I itu.

"Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus mampu mengatasi hal ini. Ini kemana Kemendag? jangan dianggap remeh-temeh persoalan ini. Keluhan dari perajin kedelai harus disikapi dengan langkah-langkah cepat. Konsumen sudah gelisah



RAFLI

Anggota Komisi VI DPR RI

Harga Kedelai Melonjak

Aleg PKS: Kado Pahit Awal Tahun Bagi Industri Tahu dan Tempe Dalam Negeri!

KUTIPAN

Jakarta (04/01) --- Di awal tahun 2021 para pelaku industri tahu dan tempe sangat terbebani dengan adanya kenaikan harga kedelai yang mencapai hampir 50%.

Kenaikan harga kedelai tersebut memukul para pelaku industri tahu dan tempe, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan mogok produksi.

Nevi Zuairina, Anggota DPR RI Fraksi PKS, mengatakan adanya kenaikan harga kedelai yang hampir mencapai 50% menjadi kado pahit bagi industri tahu dan tempe di awal tahun 2021, mengingat di tengah pandemi, yang saat ini mengalami daya beli masyarakat menurun.

"Kedelai sebagai bahan baku utama bagi industri tahu dan tempe tentu akan sangat mempengaruhi harga produk tahu dan tempe di masyarakat. Jika harga kedelai naik, maka harga tahu dan tempe di masyarakat juga akan ikut naik. Dengan begitu kenaikan harga kedelai akan menimbulkan efek berganda, mengingat para pela-

ku UMKM juga menggunakan tahu dan tempe sebagai bahan baku produk makanan yang mereka jual." tambah Anggota Komisi VI Daerah Pemilihan Sumatera Barat II itu.

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), impor kedelai sepanjang semester-I 2020 mencapai 1,27 juta ton atau senilai US\$510,2 juta atau sekitar Rp7,52 triliun (dengan menggunakan kurs Rp 14.700). Dari total impor tersebut, sebanyak 1,14 juta ton di antaranya berasal dari AS.

"Sesuai dengan amanat UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan khususnya pada pasal 54 ayat (3), Pemerintah dapat membatasi impor barang dengan alasan untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri, atau untuk

mengjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan. Tentunya hal tersebut harus diimbangi dengan peran Pemerintah untuk dapat meningkatkan produksi kedelai dari dalam negeri, sehingga kebutuhan kedelai untuk industri dapat dipenuhi tanpa harus impor," jelas Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Nevi juga mengingatkan bahwa pada tahun 1992 kita pernah melakukan swasembada kedelai, saat itu produksi dari petani kedelai Indonesia mencapai 1,8 juta ton per tahun.

"Ini ada peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan kedelai dalam negeri, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani kedelai," ujarnya.

Meredanya perang dagang antara AS dan China diduga menjadi faktor penyebab kenaikan harga kedelai. Indonesia yang sebagian besar kedelainya bergantung pada AS, menjadi terdampak ketika China memborong kedelai dari AS.

"Momentum baiknya hubungan dagang AS-China yang berakibat pada kenaikan harga kedelai harus dimanfaatkan



Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

"Kedelai sebagai bahan baku utama bagi industri tahu dan tempe tentu akan sangat mempengaruhi harga produk tahu dan tempe di masyarakat. Jika harga kedelai naik, maka harga tahu dan tempe di masyarakat juga akan ikut naik."

kan Pemerintah untuk dapat meningkatkan produksi kedelai dalam negeri," ujar Nevi.

Nevi menambahkan Pemerintah juga harus dapat memperbaiki tata niaga kedelai dalam negeri.

"Selain itu dibutuhkan kolaborasi aktif antara Kementerian dan Lembaga terkait serta melibatkan pelaku

industri dan UMKM agar dapat menciptakan stabilitas harga kedelai," imbuh Nevi.

"Melonjaknya harga kedelai juga dapat merugikan pedagang kecil. Karena nanti penjual gorengan tidak dapat menjual tahu dan tempe goreng, sehingga pendapatan mereka pun bisa berkurang." pungkas Nevi mengakhiri.



NAPAK TILAS

SANTRI DI PKS

HIDAYAT NUR WAHID

Biografi

- **Nama Lengkap :**
Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
- **Tempat, Tanggal Lahir :**
Klaten, 8 April 1960
- **Jabatan :**
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS
Wakil Ketua MPR RI
Anggota DPR RI Dapil Jakarta II

Pendidikan di Pesantren

- **Pondok Pesantren Wali Songo**
di Ngabar, Siman, Ponorogo
- **Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo-Jawa Timur**, lulus tahun 1978. Salah satu pondok pesantren yang terletak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren ini terkenal dengan penerapan disiplin, penguasaan bahasa asing, kaderisasi dan jaringan alumni yang sangat kuat.

Legislator PKS Minta Pemerintah Lanjutkan Stimulus Listrik Hingga Akhir Tahun 2021

KUTIPAN

Jakarta (04/01) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Pemerintah melanjutkan program pemberian stimulus listrik bagi masyarakat hingga akhir tahun 2021.

Menurutnya, selama aktifitas sosial kemasyarakatan belum pulih 100% maka selama itu pula sebaiknya Pemerintah memberikan bantuan.

"Saya minta program ini dilaksanakan jangan hanya sampai bulan Maret 2021. Tetapi dilanjutkan hingga akhir tahun 2021. Saat ini masyarakat masih membutuhkan bantuan untuk meringankan beban hidup akibat dampak pandemi COVID-19," ujar Mulyanto.

Mengacu pada data jumlah kasus positif COVID-19 harian yang terus meningkat, Mulyanto menilai kondisi saat ini masih belum kondusif bagi masyarakat untuk beraktifitas sebagaimana biasa. Pemerintah juga hingga saat ini masih menetapkan kebijakan pemba-

tan aktifitas ekonomi masyarakat. Untuk itu diperlukan kompensasi dari Pemerintah agar kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi.

"Program vaksinasi belum berjalan sehingga masyarakat masih rentan terpapar penularan COVID-19 ini. Mereka masih membutuhkan bantuan pihak Pemerintah," imbuh Mulyanto.

Mulyanto menambahkan berdasarkan laporan masyarakat yang diterima saat melakukan reses ke beberapa daerah, program stimulus listrik ini dirasa sangat membantu karena dapat meringankan biaya iuran listrik perbulan.

Bagi masyarakat kurang mampu pengurangan biaya tagihan listrik itu sangat berarti.

Sebab anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk membayar tagihan listrik dapat dialihkan untuk keperluan lain terkait upaya penanggulangan atau pencegahan penularan COVID-19 di tingkat keluarga.

"Karena itu sangat tidak tepat kalau Pemerintah malah menghentikan program stimulus listrik PLN ini hanya sampai Maret 2021. Pemerintah wajib untuk terus membantu meringankan beban masyarakat sampai pandemi ini benar-benar telah melandai dan masyarakat siap untuk bangkit," tegas politisi yang akrab disapa Pak Mul ini.

Untuk diketahui selama ini Pemerintah memberikan bantuan listrik dalam bentuk stimulus COVID-19 untuk daya 450 VA & 900 VA. Program tersebut diberikan untuk meringankan beban masyarakat yang tidak mampu dan rentan dalam menghadapi masa pandemi Covid-19. Bagi pelanggan rumah tangga, stimulus tersebut telah diberikan sejak April 2020 serta pelanggan bisnis dan industri kecil sejak Mei 2020.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

“Sangat tidak tepat kalau Pemerintah malah menghentikan program stimulus listrik PLN ini hanya sampai Maret 2021. Pemerintah wajib untuk terus membantu meringankan beban masyarakat sampai pandemi ini benar-benar telah melandai dan masyarakat siap untuk bangkit”.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

JOKOWI
LUNCURKAN BANSOS

Bagus, Tapi Kenapa **Berkurang** Rp 27 Triliun?

Tahun	Anggaran Bansos	Bansos tunai
2020	Rp 128,9 T	Rp 39 T
2021	Rp 110 T	Rp 12 T
	Berkurang Rp 12 T	Berkurang Rp 27 T

39 KUTIPAN

Seharusnya Pemerintah justru menambahkan anggaran bantuan sosial, selain untuk mengembalikan kepercayaan Rakyat akibat adanya korupsi dana program bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial Juliarri Batubara, juga karena akibat covid-19 pada 2020 telah terjadi lonjakan angka pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan yang masih akan terbawa hingga tahun 2021,

**Dr. H.M. HIDAYAT
NUR WAHID, M.A.**
Anggota Komisi VIII DPR RI



Jokowi Luncurkan Bansos Tunai

HNW: Bagus, Tapi Kenapa Anggarannya Berkurang Rp 27 Triliun?

KUTIPAN

Jakarta (05/01) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi program Bansos Tunai yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi, yang juga sudah diusulkan oleh banyak pihak

Tetapi pria yang akrab disapa HNW ini sangat menyayangkan terjadinya pengurangan total anggaran perlindungan sosial dari Rp 128,9T (tahun 2020) menjadi Rp 110 Triliun (anggaran tahun 2021), dan secara khusus bansos tunai dari Rp 39 T (tahun 2020) berkurang Rp 27 T menjadi tinggal Rp 12 Triliun (tahun 2021).

"Seharusnya, Pemerintah justru menambahkan anggaran bantuan sosial, selain untuk mengembalikan kepercayaan Rakyat akibat adanya korupsi dana program bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial Juliani Batubara, juga karena akibat covid-19 pada 2020 telah terjadi lonjakan angka pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan yang

masih akan terbawa hingga tahun 2021," terang HNW.

Karenanya HNW meminta Mensos yang baru, Tri Rismaharini, dan Kemensos sebagai pelaksana anggaran untuk memprioritaskan perjuangan untuk peningkatan anggaran perlindungan sosial dan bansos tunai khususnya, minimal sama dengan tahun 2020, selain memastikan validitas data penerima bansos, dan menjaga agar benar-benar tidak terjadi pemotongan bantuan itu di lapangan.

"Pada dasarnya saya apresiasi peluncuran bansos tunai yang menggantikan bansos sembako, tapi setelah saya cek, kenapa anggarannya berkurang besar sekali hingga Rp 27 Triliun? Artinya akan

banyak penerima bansos 2020 yang belum bangkit ekonominya akibat covid-19, malah makin banyak lagi yang tidak mendapatkan bantuan tunai dari Pemerintah", disampaikan Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta (05/01).

Idayat yang juga Anggota DPR-RI Komisi VIII sebagai mitra Kementerian Sosial ini menjelaskan, bansos tunai 2021 yang diluncurkan Presiden merupakan kelanjutan dari bansos tunai non-Jabodetabek dan bansos sembako Jabodetabek, sebagai bagian dari program perlindungan sosial.

"Pada tahun 2020, bansos tunai non-Jabodetabek mendapatkan alokasi anggaran Rp 32,5 Triliun dan bansos sembako Jabodetabek dialokasikan Rp 6,5 Triliun, sehingga total Rp 39 Triliun. Namun pada bansos tunai 2021 sebagai keberlanjutan kedua bansos tersebut, anggarannya dikurangi hingga tinggal Rp 12 Triliun, sehingga terdapat pemotongan sebesar Rp 27 Triliun," pungkasnya.

Pada hal menurutnya, data BPS menunjukkan sepanjang 2020 setidaknya 5,1 juta orang



Foto: detik.com

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Tugas penting dan mendesak lain bagi Mensos yg baru juga untuk memastikan validitas dan verifikasi data serta mekanisme kontrol dan pelaporan pelaksanaan program bantuan sosial tunai secara nasional, agar tak terulang terjadinya korupsi yang telah menjatuhkan Mensos Juliani Batubara, atau pemotongan oleh aparat maupun oknum di lapangan

kehilangan pekerjaan, 24 juta orang mengalami pengurangan jam kerja, dan jumlah penduduk miskin meningkat hingga 27 juta jiwa.

"Ini belum memasukkan jumlah penduduk sangat rentan miskin yang telah diselamatkan oleh Bansos sebanyak 3,4 juta jiwa menurut klaim Menkeu,

atau 8,5 juta menurut perhitungan Bank Dunia," ujar HNW.

Oleh karena itu, HNW meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk fokus memprioritaskan pengembalian anggaran bansos minimal sama dengan tahun 2020.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Pemerintah Resmi
Bubarkan FPI

Bukhori: Sebuah Kemunduran dan Mencederai Amanat Reformasi

KUTIPAN

Jakarta (30/12) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menanggapi langkah pemerintah membubarkan FPI

Bukhori menganggap tindakan tersebut sebagai sebuah kemunduran dan mencederai amanat reformasi yang menjamin kebebasan berserikat.

"Kemerdekaan berserikat adalah amanah konstitusi. Dalam Pasal 28 UUD 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang," terang Bukhori.

"Tidak hanya itu, kebebasan berserikat juga tertuang dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28E UUD 1945 yang menyebutkan: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat," ungkapnya di

Jakarta, Rabu (30/12).

Selain itu, Anggota Komisi VIII ini juga mengkritik model pendekatan pemerintah cenderung agresif sejak awal polemik. Hal tersebut berkaca pada model komunikasi publik beberapa pejabat yang kerap kali menggunakan nada ancaman hingga keputusan menolak upaya dialog rekonsiliasi.

Menurutnya, jika sejak awal pemerintah bersikap bijaksana dan persuasif, maka ketegangan antara pemerintah dan FPI bisa dimitigasi. Sehingga, tidak harus ada nyawa yang melayang, pemenjaraan Habib Rizieq,

bahkan polarisasi di tengah masyarakat yang kian menajam akhir-akhir ini.

Lebih lanjut, Ketua DPP PKS ini khawatir eskalasi terbaru, yakni dengan pembubaran FPI, justru hanya akan memperuncing ketegangan di tengah masyarakat sehingga menciptakan api dalam sekam. Pasalnya, terlepas dari segala catatan kelamnya, perlu diakui bahwa FPI turut memiliki sumbangsih besar terhadap isu sosial kemanusiaan, khususnya ketika terjadi bencana di sejumlah wilayah di Indonesia.

FPI, demikian Bukhori menerangkan, acap kali menjadi yang paling pertama dan terdepan dalam membantu korban bencana alam, misalnya saat bencana Tsunami di Aceh, gempa di Palu, dan pelbagai bencana di sejumlah wilayah lain di Indonesia. Artinya, kehadiran FPI, dalam satu dua hal, telah memberikan makna bagi sebagian masyarakat yang merasakan manfaat atas kontribusinya sejauh ini.

"Di sisi lain, FPI sesungguhnya telah menunjukkan eksistensinya sebagai aset bangsa yang kontributif jika kita bersedia jujur dalam melihat kiprahnya secara adil dan jernih. Artinya, semua persoalan yang timbul belakangan ini seharusnya bisa dibicarakan dengan baik-baik untuk mengantisipasi dendam di kemudian hari. Namun sayangnya pemerintah kadung



KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

jika sejak awal pemerintah bersikap bijaksana dan persuasif, maka ketegangan antara pemerintah dan FPI bisa dimitigasi. Sehingga, tidak harus ada nyawa yang melayang, pemenjaraan Habib Rizieq, bahkan polarisasi di tengah masyarakat yang kian menajam akhir-akhir ini.

terjebak dalam watak arogansinya," imbuhnya.

Bukhori mencatat sedikitnya ada dua kelemahan terkait tindakan pemerintah membubarkan FPI. Pertama, kegagalan pemerintah

membangun mindset bernegara. Kedua, kecacatan landasan hukum yang digunakan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



CATATAN FPKS UNTUK PENGADAAN VAKSIN COVID-19



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

- Independensi BPOM dalam me-review uji klinis
- Publikasi hasil uji klinis secara transparan, jujur, dan akuntabel
- Vaksin memenuhi syarat safety, efficacy, dan quality
- Sertifikat halal MUI
- Menjunjung tinggi keselamatan rakyat
- Selain strategi diplomasi dalam mendapatkan vaksin,
- Pemerintah harus mendukung pengembangan Vaksin Merah Putih sebagai bentuk kemandirian bangsa



Tarif BPJS Naik

Mufida: Pemerintah Abaikan Kesimpulan Rapat dengan DPR

KUTIPAN

Jakarta (04/01) --- Pemerintah resmi memberlakukan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2021 khususnya untuk peserta kelas III.

Iuran peserta kelas I masih mengikuti kenaikan yang sebelumnya pada bulan Juli yaitu Rp 150 ribu. Demikian pula dengan peserta kelas II yang masih mengikuti tarif dari kenaikan yang sebelumnya yaitu Rp 100 ribu.

Sementara untuk kelas III, kenaikan tarif pada Juli 2020 yang semula masih disubsidi oleh pemerintah dengan besaran Rp 25.500, mulai 1 Januari 2021 menjadi Rp 35.000. Tarif ini berlaku untuk semua peserta termasuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU) dan Bukan Pekerja (BP)

Menanggapi kenaikan tersebut, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menilai, Pemerintah dalam hal ini DJSN, BPJS Kesehatan dan semua pihak terkait mengabaikan

kesepakatan yang termuat dalam kesimpulan hasil rapat antara Komisi IX DPR dengan pihak BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan pada 24 November 2020 lalu.

Dalam rapat tersebut, Komisi IX DPR tegas mendesak agar Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait guna mempertimbangkan relaksasi iuran bagi peserta dari PBBU dan BP kelas III sehingga tetap membayar Rp. 25.500 pada tahun 2021.

"Ini berarti Komisi IX meminta agar DJSN bersama Direksi BPJS Kesehatan dan semua pihak terkait harus mengupayakan alternatif pembiayaan dan sumber anggaran untuk menutupi selisih dari kenaikan yang diminta oleh BPJS Kesehatan," ujar Mufida

dalam keterangannya di Jakarta, Senin (04/01).

Mufida menilai meskipun kenaikan tarif kelas III ini lebih rendah dari yang diajukan semula (Rp 42.000), namun tetap memberatkan bagi kelompok PBBU dan BP khususnya dalam situasi pandemi covid-19 yang masih berlangsung. Menurutinya kelompok PBBU dan BP ini menjadi kelompok yang paling terpuuk secara ekonomi akibat pandemi covid-19.

"Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan akibat berbagai pembatasan kegiatan ekonomi melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)," tegas Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) ini.

Mufida menyebut, Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini juga berdampak terhadap beban APBD. Pemda DKI Jakarta misalnya sampai menyiapkan anggaran khusus untuk membantu 1,1 juta orang yang berkurang pendapatan yang sebagian besarnya dalam kelompok PBBU dan BP ini.



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

meskipun kenaikan tarif kelas III ini lebih rendah dari yang diajukan semula (Rp 42.000), namun tetap memberatkan bagi kelompok PBBU dan BP khususnya dalam situasi pandemi covid-19 yang masih berlangsung. Kelompok PBBU dan BP ini menjadi kelompok yang paling terpuuk secara ekonomi akibat pandemi covid-19.

Kementerian Ketenagakerjaan sendiri melansir data ada sekitar 2,56 juta pengangguran baru dan 1,77 juta orang yang sementara tidak bekerja akibat pandemi covid-19.

Mufida yang berasal dari Fraksi PKS ini mengatakan harusnya Pemerintah memiliki kepekaan terhadap kondisi yang dialami oleh masyarakat

saat ini. Ketidakpastian pemulihan ekonomi yang menyebabkan sebagian besar PBBU dan BP masih terpuuk akibat pandemi harus jadi pertimbangan agar tidak semakin menambah beban mereka.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hoax Sinovac Mengandung Boraks, Merkuri & Unsur Babi

Netty: Segera Rilis Uji Klinisnya Agar Masyarakat Tak Panik

KUTIPAN

Jakarta (03/01) --- Isu bahwa vaksin Sinovac mengandung boraks, merkuri dan unsur babi dibantah oleh Manajer Lapangan Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari Universitas Padjadjaran (Unpad).

Ketua Tim Covid-19 F-PKS DPR RI Netty Prasetyani meminta Pemerintah segera memberikan penjelasan resmi hasil uji klinis tahap ketiga Sinovac agar masyarakat tidak panik.

"Isu beredar melalui pesan percakapan tersebut dapat membuat masyarakat bingung, panik bahkan bisa distrust terhadap pemerintah. Saat ini info melalui aplikasi komunikasi di handphone sangat cepat beredar. Jika tidak segera ditangani, hal ini berpotensi mengancam keberhasilan program vaksinasi," ujarnya dalam keterangan media, Minggu, (03/01).

Menurut Netty, Pemerintah harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi melalui komunikasi publik yang antisipatif.

"Sejak awal isu vaksin diangkat, telah menimbulkan pro kontra yang menyebabkan keraguan publik. Oleh karena itu, Pemerintah harus segera mengumumkan hasil uji klinis Sinovac secara transparan, akuntabel dan penuh kejujuran. Jangan ada yang ditutupi apapun hasil uji klinis tersebut. Pemerintah juga harus memiliki kemampuan membangun komunikasi publik yang antisipatif, cepat dan akurat.

Jangan sampai masyarakat lebih percaya pada info yang diperoleh melalui media sosial," katanya.

"Pemerintah juga harus menjelaskan kepada publik tentang informasi vaksin yang diklaim sebagai hoax, serta pembuktian dari pemerintah secara kasat mata bahwa vaksin yang didatangkan bukan yang terpampang dalam foto dan berita hoax yang beredar. Jangan sampai terjadi hal yang sama seperti Pasal-pasal RUU Ciptaker, di mana pemerintah membantah bahwa itu hoax, akhirnya timbul kegaduhan tanpa ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah" katanya.

Netty juga meminta BPOM dan LPOM MUI agar segera menyelesaikan pekerjaannya.

"Saya ingatkan bahwa dijanjikan hasil uji klinis diterima pada akhir Desember atau awal Januari. Segera umumkan tingkat kemampuan, material yang terkandung, efek samping yang mungkin timbul, serta kehalalan vaksin Sinovac dan vaksin lain yang sedang dalam masa uji klinis," pintanya.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, dalam era informasi serba cepat, keterbukaan, transparansi dan kejujuran menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan dukungan rakyat dalam setiap program pemerintah.

"Kegagalan membangun komunikasi publik akan menimbulkan kesia-siaan yang membuat situasi makin parah," tutup Netty.



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Isu beredar melalui pesan percakapan tersebut dapat membuat masyarakat bingung, panik bahkan bisa distrust terhadap pemerintah. Saat ini info melalui aplikasi komunikasi di handphone sangat cepat beredar. Jika tidak segera ditangani, hal ini berpotensi mengancam keberhasilan program vaksinasi

DI TENGAH COVID BPJS TETAP NAIK



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah tetap menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan mulai **1 Januari 2021** untuk **peserta kelas 3**.
Dari yang semula **Rp 25.500** menjadi **Rp 35.000**
di tengah masyarakat masih terdampak Covid-19.

29,12 Juta Orang Penduduk
Usia Kerja Terdampak Covid-19

	2,56 Juta Orang menjadi pengangguran
	0,76 Juta Orang bukan angkatan kerja
	1,77 Juta Orang sementara tidak bekerja
	24,03 Juta Orang bekerja dengan pengurangan jam kerja

“ Dari total penduduk usia kerja sebanyak **203,97 juta orang** persentase penduduk usia kerja yang terdampak covid-19 sebesar **14,28%**, sedangkan angkatan kerja yang terdampak sebesar **20,51%** ”



Data : BPS sakernas agustus 2020

Imbas Dihapusnya CPNS Guru

Fikri: Apakah Negara jadi Swasta, Semua Guru Status Kontrak?

KUTIPAN

Semarang (06/01) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih mempertanyakan dihapusnya status guru PNS menjadi tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) mulai 2021

“Apakah negara ini sudah menjadi swasta dengan menempatkan posisi guru sebagai tenaga kontrak?” tandasnya di Semarang, Rabu (06/01).

Awal tahun 2021 menjadi kabar terburuk bagi semua pahlawan tanpa tanda jasa, gelar yang senantiasa diberikan pada guru, garda depan Pendidikan bangsa ini.

Pemerintah menetapkan dihapusnya formasi CPNS untuk guru. Sebagai gantinya, kebutuhan guru yang nyaris mencapai satu juta guru senusantara itu akan direkrut melalui PPPK. “Bahasa lainnya kontrak,” ujar Fikri.

Menurut politisi PKS ini,

perubahan kebijakan tersebut membuat syok masyarakat guru dan publik secara umum.

“Karena guru adalah profesi yang dibanggakan banyak orang dan dicita-citakan anak sejak kecil, dengan tujuan mulia: mengabdikan pada negara untuk kemajuan bangsa,” katanya.

Namun sekarang, guru bukanlah sebuah profesi pengabdian lagi yang bisa dibanggakan.

“Orang desa itu sederhana, bercita-cita jadi pak dan bu guru PNS di kampung, sudah top markotop. Anak-anaknya wajib sekolah pendidikan guru, bahkan apapun dijual sampai mereka

lulus dan dapat gelar,” imbuh mantan guru ini.

Bahkan, lanjutnya, agar bisa diangkat menjadi PNS guru, banyak orang memang sengaja magang di sekolah.

“Dulu namanya wiyata bhakti. Mereka biasanya sudah menikah dan punya anak 1 atau 2, harapannya akan menggantikan yang pensiun atau mangkat dari PNS,” ungkap dia.

Cerita dari honorer guru Kategori 2 (K2) lebih miris lagi. “Ada yang sudah lulus tes PPPK seperti yang dijanjikan, tapi sudah 22 bulan lebih SK-nya belum diangkat. Karena beliau K2, usianya juga sudah tua, dan kini sudah masuk masa pensiun, miris,” ucap Fikri.

Fikri menambahkan, cita-cita anak saat ini bisa berubah, sesuai dengan keadaan zaman.

“Anak-anak sekarang mungkin tidak lagi bercita-cita menjadi guru, karena statusnya tidak jelas, alias kontrak, yang bisa dipecah sewaktu-waktu,” kata dia.

Fikri meminta pemerintah berempati atas kondisi masyarakat yang sedang sulit saat ini.

“Silahkan saja mengubah kebijakan sebagai penguasa. Tapi mbok ya empatinya ditunjukkan sedikit saja,” pintanya.

“Toh, negara ini bukanlah swasta, yang bisa mengontrak pekerja sesuai kebutuhan saja. Kalau sudah tidak berguna, ditinggalkan.” Pungkas Fikri.



Foto: dpr.go.id

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

“Karena guru adalah profesi yang dibanggakan banyak orang dan dicita-citakan anak sejak kecil, dengan tujuan mulia: mengabdikan pada negara untuk kemajuan bangsa, Namun sekarang, guru bukanlah sebuah profesi pengabdian lagi yang bisa dibanggakan

Pembelajaran Tatap Muka **Aleg FPKS: Pemerintah Pusat Tak Boleh Lempar Tanggungjawab pada Pemerintah Daerah!**

KUTIPAN

Jakarta (01/01) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmi Alaydroes menyampaikan kritik dan sarannya kepada Pemerintah mengenai Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka.

Hal ini disampaikan dalam acara PKS Legislative Corner dengan tema Sekolah Tatap Muka Awal Tahun. Antara Berosan atau Tantangan Bahaya?, Jakarta, Jumat (01/01).

Fahmi menyatakan, bahwa pembelajaran tatap muka ditinggah kondisi yang masih sangat risikan seperti saat ini tidak boleh dilaksanakan sembarangan dan terburu-buru, artinya harus cermat dan seksama.

"Antara prinsip kesehatan dan keselamatan jiwa anak-anak dengan kemajuan belajar anak-anak itu sendiri, dua hal ini harus berjalan beriringan sehingga kebijakan belajar di rumah maupun Pembelajaran Tatap Muka (PTM) itu menurut

kami bukan perkara inti atau bukan perkara yang sebenarnya. Jadi perkara yang sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan efektivitas pembelajaran itu sendiri. Jadi dapat kita ambil satu solusi yang substantif ketika daerah masih merah, orange atau kuning artinya masih risikan, maka gak bisa ada pilihan lain, maka aktifkan dan efektifkan PJJ itu," jelas Anggota Dapil Jawa Barat V tersebut.

Fahmi menjelaskan, bahwa hal yang harus difokuskan Pemerintah adalah menyiapkan infrastruktur digital. Kemudian, modul-modul pembelajaran di rumah yang kaya, interaktif dan menantang

serta melatih guru-guru sedemikian rupa sehingga pembelajaran dari rumah dapat menyenangkan, menarik, berbasis project dan seterusnya-seterusnya.

Ia menambahkan, bahwa banyak sekali hal yang bisa dilakukan sehingga siswa-siswi tidak mengeluh, jenuh dan lain sebagainya. Seperti kreatif mengaktifkan televisi, radio yang selama ini juga sudah dilakukan untuk dikembangkan kembali. Kemudian bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan pihak-pihak swasta dan media.

"Jika jaringan stabil, kadang tidak ada voucher atau pulsa. Apabila diberikan kontribusi dari pemerintah, kemudian gadgetnya bermasalah," tambahnya.

Fahmi selaku pengamat Pendidikan juga menelusuri, bahwa persoalan keterbatasan pembelajaran yang utamanya adalah infrastruktur WiFi atau Internet. Banyak sekali daerah-daerah yang tidak stabil bahkan sampai dipingir Jakarta.



Dr. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed

Anggota Komisi X DPR RI

Pemerintah Pusat dalam hal ini kemendikbud dan kemenag tidak bisa melepas begitu saja harus ada desk atau ada satgas atau ada satu Tim yang terus menerus memantau bagaimana perkembangan PTF ini,

Disisi lain, Fahmi juga merespon Kebijakan Pemerintah Pusat yang melampirkan hal ini kepada Pemerintah Daerah. Artinya, tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh pemerintah daerah sendiri. Jadi ketika pemerintah pusat melepaskan atau memberikan kewenangan kepada

pemerintah daerah. Pemerintah pusat harus melakukan pengawasan secara seksama. Jangan dilepas begitu saja. Harus ada komunikasi dan koordinasi yang terus-menerus antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

LPEI Dapat Suntikan
PMN 5 Triliun

Anggota FPKS: Harusnya Dorong Ekspor UMKM

KUTIPAN

Suntikan modal ini diberikan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan mendorong perekonomian nasional.

Jakarta (07/01) — Pemerintah memutuskan menambahkan modal kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp 5 triliun.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam Modal LPEI, yang diteken Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2020 lalu.

Suntikan modal ini diberikan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan mendorong perekonomian nasional.

“Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia EximBank membukukan rugi bersih sebesar Rp 4,7 triliun pada

2019. Selain kerugian, LPEI juga mencatatkan penurunan aset hampir 10% menjadi Rp 108,7 triliun pada 2019, “tutur anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi PKS, Anis Byarwati, saat diminta pandangannya di Jakarta, Rabu (06/01/2021).

Selain itu, Anis juga mengungkapkan bahwa terdapat 14 temuan BPK dalam laporannya yang menilai kinerja pemberian fasilitas pembiayaan di LPEI belum maksimal. Terutama pemantauan pada debitur-debitur yang berpotensi bermasalah.

“Saya kira LPEI harus menindaklanjuti temuan-temuan BPK ini,” tambah Anis.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menilai, harus ada langkah strategis yang diambil LPEI

ditengah semakin ketatnya likuiditas ditambah dengan semakin besarnya defisit pendapatan Pemerintah pada tahun 2019.

Anis juga memberikan catatan untuk Non Performing Financing (NPF) dari LPEI yang termasuk tinggi. Berdasarkan data per 31 Desember 2019, NPF bruto LPEI sudah mencapai 23,39%, meningkat tajam dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 13,73%. Angka tersebut sangat tinggi apabila dibandingkan dengan Bank-bank BUMN yang hanya berkisar antara 2-5%.

“Tingginya NPF ini seharusnya menjadi catatan tersendiri, terutama apabila LPEI akan dilibatkan dalam program stimulus perekonomian dalam rangka menangani wabah Covid,” tegasnya.

Adapun terkait dengan Langkah Pemerintah memberikan tambahan PMN untuk LPEI, Anis menyatakan LPEI dapat menjadi Lembaga strategis untuk mendorong ekspor UMKM.

Dalam siaran pers nya, LPEI menyatakan baru bisa memfasilitasi sekitar 2200 UMKM hingga saat ini.

“Angka tersebut masih relatif sangat rendah dengan besarnya potensi yang ada,” tutup Anis.



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

“Terdapat 14 temuan BPK dalam laporannya yang menilai kinerja pemberian fasilitas pembiayaan di LPEI belum maksimal. Terutama pemantauan pada debitur-debitur yang berpotensi bermasalah. Saya kira LPEI harus menindaklanjuti temuan-temuan BPK ini

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Masa Reses, Nevi Serahkan Sejumlah Bantuan pada Lembaga di Dapil pada Awal Tahun

KUTIPAN

Padang Pariaman (06/01) --- Anggota DPR RI asal Sumatera Barat dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina untuk mengawali aktivitasnya di tahun 2021, menggelontorkan bantuan dana ke tujuh lembaga.

Bantuan pada lembaga tersebut paling kecilnya senilai 14 juta rupiah, sedangkan paling besarnya sebesar 100 juta rupiah.

Sementara itu, lembaga dan daerah yang dibantu Politisi PKS ini antara lain: Bantuan Bajak singkal (kel Tani Satria Jaya) , Pasaman; Bantuan BaJak singkal, Pasaman (Kel Tani Harapan Jaya); Renovasi Pembangunan Gedung Pustaka dan insinya SD IT Cahaya Madani, Pasaman; Pengadaan Komputer dan Infokus -MIS Muhammadiyah Tamiang, Pasaman Barat; Bantuan Renovasi Ruang Kelas Baru SD IT Cahaya Hati pauh Kembang, Padang Pariaman; Bantuan Ruang Kelas Baru TK IT Izzatul Khonsa, Padang Pariaman; dan Bantuan Sarana Prasarana

Buku MDTA Darul Muttaqien.

"Alhamdulillah dapat terlaksana bantuan ini. Pada dasarnya, program ini sudah di susun dengan beberapa lembaga sejak tahun lalu (2020). Dengan realisasinya di awal tahun ini, semoga menjadi awal yang baik terhadap kinerja saya di dapil untuk memberikan pelayanan pada masyarakat", tutur Nevi.

Bantuan-bantuan diawal tahun ini, difokuskan pada daerah pasaman dan padang pariaman. Nevi lagi berusaha, untuk terus membangun kerjasama pada berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta untuk memberikan dana sosialnya kepada masyarakat Sumbar khususnya di daerah pemilihannya.

Semua program kerja di lapangan, oleh Nevi dibuat tidak jauh-jauh pada memenuhi tujuan Sumbar memiliki masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga yang religius. Selain itu, Pembangunan SDM pertanian dan para pelaku UMKM juga menjadi satu kesatuan program utamanya di daerah pemilihannya.

"Saya memiliki cita-cita, gini rasio masyarakat sumbar ini tidak terlalu njomplang. Apa yang saya lakukan, selain berusaha untuk mewujudkan-nya, juga mengajak pada semua pihak yang memiliki sumberdaya untuk memiliki kesamaan visi memperkuat kualitas ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat Sumbar", jelas Nevi.

Aktivis perempuan dari PKS ini dalam merealisasikan program kerjanya, telah membentuk relawan-relawan di tiap kabupaten untuk menggali potensi sekaligus menjadi perantara penyaluran. Data yang ia pakai selain dari informasi-informasi dinas terkait, juga berasal dari survey lapangan dari relawan yang ia bentuk.



Foto : detik.com

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

Semoga upaya saya ini ada dampaknya terutama masyarakat Sumbar. Kita kerjakan yang bisa saya kerjakan, kerja sama berbagai pihak sebagai penentu realisasinya program kedadilan ini. Harapan saya yang paling utama adalah, para penerima bantuan agar amanah.

"Semoga upaya saya ini ada dampaknya terutama masyarakat Sumbar. Kita kerjakan yang bisa saya kerjakan, kerja sama berbagai pihak sebagai penentu realisasinya program kedadilan ini. Harapan saya yang paling

utama adalah, para penerima bantuan agar amanah. Bagaimana dana bantuan yang ada, dapat dipergunakan secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan manfaat sebesar-besarnya", tutur Nevi Zuairina.

Dialog Dengan Masyarakat Bone, Akmal Serahkan Bantuan Kepada Petani dan Nelayan

KUTIPAN

Kabupaten Bone (05/01) -- Legislator asal Sulawesi Selatan, Andi Akmal Pasluddin masih pada suasana reses masa persidangan II tahun 2020-2021 gencar bertatap muka dengan masyarakat

Setelah bertemu dengan masyarakat Kabupaten Maros, tepatnya di kec. Moncongloe, akmal langsung meluncur ke Bone dengan tujuan bersilaturahmi dengan masyarakat sebanyak-banyaknya titik yang didatangi.

"Pandemi ini hingga awal tahun 2021 ini masih belum usai. Untuk itu bantuan-bantuan sekedarnya kepada masyarakat di dapil, saya upayakan meskipun tidak besar tapi

banyak titiknya", ucap Akmal.

Dialog yang dilakukan Politisi PKS ini, digunakan sebagai wahana serap aspirasi menjelang masa sidang baru yang akan dimulai 11 Januari 2021 mendatang. Segala informasi langsung dari lapangan, sesuai dengan mitra kerjanya di bidang pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan dan lingkungan ia kumpulkan bersama seluruh relawan yang ia miliki di tiap kabupaten kota dapil Sulawesi Selatan II.

Untuk persoalan ekonomi rumah tangga, Akmal sengaja mengundang para ibu-ibu tokoh masyarakat. Sedangkan para nelayan dan petani juga ia undang untuk mengetahui kondisi masa pandemi ini sekaligus untuk merumuskan penyelesaian persoalan di lapangan.

"Untuk mengawali tahun 2021 ini, konsolidasi masyarakat dengan DPR tetap dilakukan untuk menjaga ketersediaan informasi di lapangan dengan kebijakan di atas. Rumusan yang akan kita susun di Sidang Komisi IV DPR nantinya, akan memiliki dasar

yang nyata karena sesuai dengan persoalan di lapangan sesuai dapil masing-masing seluruh Indonesia", tutup Andi Akmal Pasluddin.



Untuk mengawali tahun 2021 ini, konsolidasi masyarakat dengan DPR tetap dilakukan untuk menjaga ketersediaan informasi di lapangan dengan kebijakan di atas. Rumusan yang akan kita susun di Sidang Komisi IV DPR nantinya, akan memiliki dasar yang nyata karena sesuai dengan persoalan di lapangan sesuai dapil masing-masing seluruh Indonesia



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II



Hermanto Kunjungi Peternak Sapi yang Bangkit dari Keterpurukan Akibat Wabah

KUTIPAN

Padang (01/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto dalam kunjungan kerjanya di Dapil Sumatera Barat (Sumbar) mengunjungi kelompok tani Sawah Mandarek di Sungai Pisang, Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

Kelompok penerima sapi bantuan pemerintah tahun 2017 ini berhasil bangkit dari keterpurukan akibat wabah penyakit ternak.

"Kesabaran, ketekunan dan keompakan kelompok tani ini luar biasa sehingga bisa mengubah keterpurukan menjadi keberhasilan. Patut menjadi contoh bagi petani lainnya", ucap Hermanto menanggapi paparan Efrinaldi yang mengisahkan secara singkat perjalanan sapi bantuan di kelompok tersebut.

Menurut Efrinaldi, kelompok menerima bantuan sapi Bali sebanyak 20 ekor. Tidak lama setelah tiba di

lokasi, sapi tersebut satu per satu mati karena wabah yang diduga virus Jembrana. Sebanyak 10 ekor sapi mati akibat wabah tersebut. Sepuluh ekor sapi yang tersisa berhasil hidup dan berkembang biak hingga kini berjumlah total 25 ekor.

"Bahkan sekarang sudah ada cucu dari sapi bantuan tersebut," ungkap Efrinaldi.

Hermanto menilai, para petani yang berhasil mengelola bantuan pemerintah perlu mendapat apresiasi.

"Mereka ini pahlawan karena berhasil menjaga dan mengembangkan aset negara, sekalipun keuntungannya untuk

kesejahteraan mereka sendiri," tutur legislator dari FPKS ini.

Kunjungan Hermanto ke lokasi tersebut, dimanfaatkan oleh petani setempat untuk menyampaikan berbagai aspirasinya.

Efrinaldi sebagai Ketua Kelompok Sawah Mandarek menyebutkan belum lama ini di lokasinya diterjang banjir besar yang menyebabkan irigasi rusak dan ada yang putus. Selain itu batu-batu besar berserakan di sawah. Ia minta irigasi diperbaiki dan batu-batu besar itu diangkat dengan alat berat.

Ia juga minta bantuan mesin tempel dan alat tangkap ikan untuk perahu nelayan. Satu kelompok nelayan berjumlah 20 orang. Saat ini hanya punya 2 unit mesin tempel. Dua unit mesin tempel itu dipakai secara bergantian oleh 20 nelayan. "Perahunya sudah ada, mesin tempelnya yang kurang," keluh Efrinaldi.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

"Kesabaran, ketekunan dan keompakan kelompok tani ini luar biasa sehingga bisa mengubah keterpurukan menjadi keberhasilan. Patut menjadi contoh bagi petani lainnya"

Ringankan Beban Warga Kabupaten Tasikmalaya, Aleg PKS ini Berikan Paket Sembako

KUTIPAN

Kabupaten Tasikmalaya (06/01) — Pergantian tahun merupakan momen yang sangat dinantikan oleh sebagian masyarakat.

Biasanya pergantian tahun akan dirayakan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah wisata keluar kota dan memasang kembang api.

Lain halnya dengan Anggota DPR RI asal Fraksi PKS, Toriq Hidayat, di awal tahun 2021 bersama dengan Dewan Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kabupaten Tasikmalaya memberikan bantuan Paket Sembako kepada masyarakat yang terdampak Pandemi.

“Sulitnya ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi bertambah sulit dengan kenaikan harga

kebutuhan pokok jelang dan paska tahun baru. Daging ayam, cabai, dan telur diantara harga kebutuhan pokok yang naik di Kabupaten Tasikmalaya,” ungkap Toriq.

Toriq menambahkan, bahkan tahu dan tempe, makanan murah tinggi protein sebagai alternatif pengganti daging untuk masyarakat kecil, dilaporkan telah hilang beberapa hari dari pasar. Warga mengeluh, yang mereka ingin pasokan olahan kedelai ini kembali dipasarkan.

“Saya berharap kepada Pemerintah daerah khususnya di Kota/Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya menjadikan harga-harga kebutuhan pokok yang naik kembali turun”, harap Anggota Legislatif dari daerah pemilihan Jabar XI yang melingkupi Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut.

Oleh sebab itu untuk meringankan beban Kebutuhan Pokok warga Kabupaten Tasikmalaya, tambahnya, bekerjasama dengan DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya telah mendistribusikan ratusan paket

sembako ke Tasik Utara yaitu daerah Ciawi dan Tasik Selatan dan Barat yakni daerah Singaparna.

”

“Sulitnya ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi bertambah sulit dengan kenaikan harga kebutuhan pokok jelang dan paska tahun baru. Daging ayam, cabai, dan telur diantara harga kebutuhan pokok yang naik di Kabupaten Tasikmalaya



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Komisi I DPR RI





PKS BERDUKA

KEMATIAN TENAGA MEDIS INDONESIA AKIBAT COVID-19 TERTINGGI DI ASIA. NEGARA HARUS SELAMATKAN MEREKA!

Kematian tenaga medis dan kesehatan di Indonesia tercatat paling tinggi di Asia, dan 5 besar di seluruh dunia. Bahkan, sepanjang bulan Desember 2020 mencatat 52 tenaga medis dokter meninggal dunia akibat terinfeksi virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

Jumlah **504** petugas medis dan kesehatan yang meninggal dunia :

Perincian Dokter yang meninggal dunia

237
Dokter

15
Dokter Gigi

131
Dokter Umum
(4 Guru Besar)

101
Dokter Spesialis
(9 Guru Besar)

5
Residen

171
Perawat

64
Bidan

7
Apoteker

10
Tenaga Laboratorium



Dukung Produksi
Pupuk Organik,

Slamet Salurkan Sapi untuk Peternak di Sukabumi

KUTIPAN

Sukabumi (30/12) — Anggota Komisi IV
DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (F-PKS), Slamet,

menyalurkan bantuan sapi
kepada peternak di wilayah
Cimenteng Kabupaten
Sukabumi.

Slamet mengatakan,
bantuan ini berasal dari
Kementerian Pertanian ini.

Slamet berharap bantuan
tersebut dapat meningkatkan
produksi pupuk organik oleh
para peternak di Sukabumi.
Penyaluran bantuan ini juga
merupakan bagian dari
kegiatan reses Slamet.

"Saya apresiasi karena
bagus, tinggal pengawalan dan
pendampingan dari penerima/
peternak. Tujuannya kan ingin
mengembalikan pupuk
organik," kata Slamet kepada
awak media, Rabu (30/12).

Slamet berujar, dirinya siap
membantu proses pengawalan

dan pendampingan bantuan ini,
sehingga dapat benar-benar
meningkatkan kesejahteraan
peternak dari penjualan pupuk
organik yang dihasilkan.

"Mulai proses
pemeliharaan, pembuatan
pupuk, hingga penjualan akan
kita dampingi. Sehingga produk
ini bisa berjalan," ucapnya.

Slamet mengungkapkan,
masalah dalam bantuan
terkadang datang dari proses
pelaksanaannya. Oleh karena
itu ia berkomitmen untuk
mengawal dan mendampingi
para peternak.

"Nanti kita bekerjasama
dengan perusahaan yang
bergerak di agribisnis dan
pemerintah daerah,"
tambahnya.



drh. H. SLAMET

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IV

Masalah dalam bantuan terkadang datang dari proses pelaksanaannya. Oleh karena itu ia berkomitmen untuk mengawal dan mendampingi para peternak. Nanti kita bekerjasama dengan perusahaan yang bergerak di agribisnis dan pemerintah daerah

Kunjungi Pesantren di Depok,

Nur Azizah: Pentingnya Pendidikan Kewirausahaan Bagi Santri!

KUTIPAN

Depok (02/01) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, mengunjungi salah satu Pondok Pesantren penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kemenag RI, Ponpes Hidayatullah di Jalan Raya Kali Mulya, Cilodong, Kota Depok, pada Sabtu (26/12).

Pada kesempatan ini, Nur Azizah memberikan santunan kepada santri yatim Ponpes Hidayatullah.

Nur Azizah turut menyampaikan agar di setiap ponpes penting adanya pendidikan wawasan kewirausahaan, agar setelah lulus dari pesantren, para santri dapat hidup mandiri dan berdayaguna bagi masyarakat.

Dalam kegiatan ini turut dihadiri Lurah Kali Mulya, Nandang Juhana, Ketua TP PKK Kelurahan Kali Mulya, Aning Wati, Ketua SPKK DPC PKS Cilodong, Indah Wahyuningsih, Ketua UPKK DPC PKS Kali Mulya, Siti Nuriyati, Tokoh

masyarakat Agustin Kurniawati, Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah, Lalu Maburr, serta Kasi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Depok Harry Maulana.

Ponpes Hidayatullah sebagai salah satu penerima manfaat BOP Kemenag RI yang digelontorkan melalui Nur Azizah, Anggota Komisi VIII DPR RI kepada 46 Ponpes, 1 Madrasah Diniyah Takmiliah, dan 140 TPQ di Depok dan Bekasi yg bernilai sekitar Rp. 2.6 Milyar.

Nur Azizah berharap Ponpes Hidayatullah dan lembaga yg lain di Depok dan

Bekasi dapat memanfaatkan BOP untuk menunjang kelancaran pendidikan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, khususnya di masa Pandemi Covid-19.

"Insha Allah BOP yang telah tersalurkan di ponpes ini dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Khususnya untuk menunjang kelancaran pendidikan di masa pandemi Covid-19. Terimakasih kepada para pengurus yayasan yang telah mengelola dan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya", jelas Nur Azizah.

Pimpinan Ponpes, Lalu Maburr, mengucapkan terimakasih atas kunjungan serta bantuan dan santunan yang diberikan oleh Nur Azizah.

Lalu menyebutkan bahwa Ponpes Hidayatullah di Kalimulya adalah bagian dari Lembaga Pendidikan dan Dakwah Hidayatullah yang memiliki 320 cabang di seluruh Indonesia.

Ada 1.250 santri di Ponpes Hidayatullah Depok, dan saat ini santri Hidayatullah Depok sudah dapat menjalani wirausaha dengan mengembangkan bisnis Hidroponik.



Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI **Nur Azizah Tamhid** saat bertemu bersama santri dan pengurus Ponpes Hidayatullah di Jalan Raya Kali Mulya, Cilodong, Kota Depok, pada Sabtu (26/12).

Insha Allah BOP yang telah tersalurkan di ponpes ini dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Khususnya untuk menunjang kelancaran pendidikan di masa pandemi Covid-19

Dimana sayuran yang dihasilkan dikelola dengan baik oleh santri sehingga menambah pemasukan bagi santri dan pesantren.

"Target kami adalah tarbiyah dan dakwah. Alhamdulillah sudah ada pendidikan formal dari tingkat Paud hingga Perguruan Tinggi. Untuk jenjang pendidikan Aliyah

ada beasiswa bekerjasama dengan Baznas, dan ditingkat SD dan SMP juga kita memberikan peluang beasiswa untuk adik-adik yang kurang mampu. Dengan pengelolaan tanaman hidroponik di ponpes juga dapat bermanfaat bagi santri", terang Lalu Maburr. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Syaikhu Serap Aspirasi Tokoh dan Masyarakat Desa Parakan, Karawang

KUTIPAN

Salah satu yang dapat diusulkan melalui program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Ini merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menjadi mitra Komisi V DPR RI

Kabupaten Karawang (01/01) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu bertemu dengan tokoh dan masyarakat di Desa Parakan, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Rabu (30/12). Kegiatan ini dalam rangkaian Reses ke-1 Masa Sidang Tahun 2020-2021.

Saat memberikan sambutan, Syaikhu yang duduk di Komisi V membuka kesempatan kepada tamu undangan yang hadir untuk mengajukan usulan. Yakni berupa sarana untuk perbaikan lingkungan.

"Silakan bapak-bapak untuk mengajukan usulan. Apa saja yang harus diperbaiki agar kondisi lingkungan semakin baik," ujar Syaikhu.

Salah satu yang dapat diusulkan melalui program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Ini merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menjadi mitra Komisi V DPR RI.

"Ini ada namanya BSPS. Masyarakat dapat mengusulkan perbaikan rumah yang sudah tidak layak huni melalui

program ini," jelas Syaikhu.

Tujuan dari BSPS, lanjut Syaikhu, agar terwujudnya rumah layak huni bagi rakyat.

Pelaku utama pembangunan rumah ini adalah masyarakat dengan semangat kegotongroyongan, dan keberlanjutan kegiatan.

"Di beberapa tempat program ini sudah berjalan. Insya Allah bantuannya tepat sasaran, tepat prosedur, tepat waktu, pemanfaatan optimal dan akuntabel," papar Syaikhu.

Camat Tirtamulya Dindin Rahmadi menyambut antusias tawaran tersebut. Dia pun memberikan apresiasi kepada Syaikhu.

"Ini program bagus. Apresiasi kepada Pak Syaikhu yang memberikan kesempatan untuk pengajuan BSPS," kata Dindin.

Dalam kesempatan itu, Syaikhu didampingi aparat kecamatan dan desa setempat meninjau lokasi rumah yang akan diusulkan ikut BSPS.



Ahmad Syaikhu saat bertemu dengan tokoh dan masyarakat di Desa Parakan, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Rabu (30/12). Kegiatan ini merupakan rangkaian Reses ke-1 MS Tahun 2020-2021



Tujuan dari BSPS adalah agar terwujudnya rumah layak huni bagi rakyat. Pelaku utama pembangunan rumah ini adalah masyarakat dengan semangat kegotongroyongan, dan keberlanjutan kegiatan

Sakinah Aljufri Serap Aspirasi Kepala Sekolah dan Masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una

KUTIPAN

Tojo Una-Una (07/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Komisi X, Sakinah Aljufri, dalam kegiatan Resesnya

melakukan serap aspirasi di desa Tete Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.

Dalam reses ini, para guru honorer menyampaikan aspirasi atas nasib mereka yang sudah ikut ujian PPPK rekrutmen tahap I pada Februari tahun 2019 silam yang sampai saat ini belum mendapatkan SK.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penyampaiannya mengatakan dalam rapat beberapa bulan yang lalu.

"Pemerintah telah menyampaikan kepada kami bahwa Januari 2021 SK pengangkatan guru THK-2

menjadi PPPK tahap I akan selesai, maka kita tunggu realisasinya," ujar Sakinah.

Lebih lanjut Sakinah pun berharap agar Pemerintah lebih serius dan cepat menyelesaikan permasalahan guru honorer yang berlarut-larut tidak kunjung selesai.

"Pemerintah pusat harus serius menyelesaikan permasalahan guru honorer, terutama bagi guru yang berada di daerah 3T. Kondisi guru-guru honorer di daerah 3T sangat memprihatinkan, terlebih saat wabah Covid-19 masih mewabah," ungkap Sekjen Pengurus Pusat Wanita Islam Al-Kharaat.

Sakinah pun menekankan agar pemerintah lebih matang dalam setiap merencanakan program.

"Janji tinggallah janji, harapan itu telah sirna. Pemerintah tidak matang dalam perencanaan 1 jt guru honor yang siap dimasukkan dalam PPPK. Senyum dan harapan yang begitu tergambar pada wajah para guru honor saat mendengar informasi dari pemerintah berjuta kebahagiaan terpancar ke wajah mereka kini

senyum itu berubah menjadi kusam atas berita yang didengar. Sungguh perencanaan yang tidak matang, jangan memberikan harapan apalagi disaat pandemi covid-19 yang melanda," terang Sakinah

Para guru dan wali murid yang hadir dalam kegiatan ini pun memberikan apresiasi kepada Sakinah Aljufri atas bantuan beasiswa PIP yang diberikan.

"Adanya beasiswa PIP seperti air yang ada di padang pasir, kami sangat-sangat mengapresiasi kinerja ibu," tutur perwakilan kepala sekolah yang hadir.

Selain itu, para kepala Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah yang hadir pun sangat berharap beasiswa PIP aspirasi dapat juga diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

Turut hadir dalam kegiatan ini Pemerintah Daerah, tim pemenangan, ibu-ibu Wanita Islam Al-Kharaat, tokoh masyarakat setempat serta para guru dan wali murid siswa sekolah.



Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Tengah

"Pemerintah pusat harus serius menyelesaikan permasalahan guru honorer, terutama bagi guru yang berada di daerah 3T. Kondisi guru-guru honorer di daerah 3T sangat memprihatinkan, terlebih saat wabah Covid-19 masih mewabah".





*Turut
Berduka
Cita*



Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI
Turut Berduka Atas Wafatnya

Drs. H. M. Irsjad Djuwaeli, MM

Ketua Majelis Amanah Mathla'ul Anwar

Semoga semua kebaikan & amal ibadah
Almarhum diterima di sisi Allah SWT.
Semoga keluarga yang ditinggalkan
diberikan kekuatan dan kesabaran.



Habib Aboe Bakar Alhabsyi

Ketua MKD DPR RI

HNW Sambut Baik KTT yang Berhasil Damaikan Kembali Negara-negara Teluk

KUTIPAN

Jakarta (07/01) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, menyambut baik suksesnya penyelenggaraan KTT Dewan Kerjasama Teluk (GCC) yang digelar di Provinsi Al-Ula, Arab Saudi (05/01/2021).

Melalui keterangannya di Jakarta (06/01/2021), pria yang akrab disapa HNW ini menyambut baik berbagai keputusan dan langkah strategis yang ditetapkan dalam Pernyataan Penutup (Closing Statement) KTT tersebut, terutama mengenai rekonsiliasi hubungan diplomatik antara negara Teluk, antara Saudi Arabia dan negara-negara anggota lainnya dengan Qatar.

"Kami ucapkan selamat kepada Khadimul Haramain Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Alu Su'ud, dan juga Yang Mulia Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, atas terjadinya rekonsiliasi dan islah, serta kebijakan produktif yang disepekat demi menyongsong masa depan yang lebih baik, menuju kemajuan yang lebih berarti, bagi seluruh negara di

kawasan Teluk serta negara-negara sahabatnya di seluruh dunia," ungkap HNW.

HNW juga memberikan apresiasi khusus atas upaya Kuwait yang berperan sebagai mediator dalam mendamaikan konflik diplomatik di Teluk sehingga terjadinya rekonsiliasi melalui KTT itu dapat tercapai dengan sukses.

"Legacy berharga dari Amir Kuwait, Almarhum Syaikh Sabah Ahmad Al-Sabah sebagai Emir Kuwait terdahulu, ternyata tetap dapat dilanjutkan dengan baik di tangan Emir Nawaf bin Ahmad Al-Sabah, emir Kuwait yg baru," pungkash HNW.

HNW yang juga selaku Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II (meliputi Luar Negeri) ini menegaskan bahwa rakyat Indonesia senantiasa mengharapkan kondisi kawasan

Teluk yang stabil, aman, serta berdaulat.

HNW juga menegaskan bahwa hubungan Indonesia dari tingkat parlemen, pemerintah, hingga rakyatnya, berharap akan selalu terjalin dengan baik dengan negara-negara sahabat di kawasan Teluk.

"Kami rakyat Indonesia selalu memperhatikan dengan seksama perkembangan di kawasan, dan kami pun bersyukur, juga merasa lega atas hasil KTT baru-baru ini yang hadirkan rekonsiliasi dan islah. Dengan demikian lembaran lama telah ditutup, dan menandakan telah dibukanya lembaran-lembaran baru yang mencerahkan bagi kawasan Teluk yang lebih maju, aman, dinamis, serta berdaulat," tegas HNW.

HNW juga mengapresiasi sikap negara-negara GCC yang konsisten mendukung Palestina, antara lain dengan tetap mengakui/memperjuangkan Palestina sebagai negara merdeka yang berdaulat dengan beribukota di Yerusalem Timur; mengutuk tindakan-tindakan Israel yang senantiasa mengubah identitas dan status quo Yerusalem melalui pengusuran warga Palestina,



Foto: jawapos.com

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI





"Kami rakyat Indonesia selalu memperhatikan dengan seksama perkembangan di kawasan, dan kami pun bersyukur, juga merasa lega atas hasil KTT baru-baru ini yang hadirkan rekonsiliasi dan islah. Dengan demikian lembaran lama telah ditutup, dan menandakan telah dibukanya lembaran-lembaran baru yang mencerahkan.

aneksasi, dan pemukiman-pemukiman ilegal; menegakkan implementasi Resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB seperti Resolusi No. 2334; serta mendukung UNRWA,

sebagaimana tercantum dalam Closing Statement KTT kemarin. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/fraksi.pks.dpr.ri)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV-DPR-RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***